



MILIK UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

**PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN MELALUI
PEMILIHAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI
PRIORITAS BERBASIS PERTANIAN DI
KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Jember

Asal:	Hal ah Pembelian	Klasa
Terima Tgl :	19 JUN 2006	330.1
No. Induk :		RAH
Oleh: IR / PENYALIN:	<i>[Signature]</i>	P

IWAN RAHARJO
NIM. 000810101126

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI
2006**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Iwan Raharjo
NIM : 000810101126
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengembangan Perekonomian Melalui Pemilihan
Sektor-sektor Ekonomi Prioritas Berbasis
Pertanian di Kabupaten Situbondo

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri, apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jember, 27 Mei 2006

Yang Menyatakan,



(Iwan Raharjo)

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengembangan Perekonomian Melalui Pemilihan Sektor-sektor
Ekonomi Prioritas Berbasis Pertanian Di Kabupaten Situbondo

Nama Mahasiswa : Iwan Raharjo

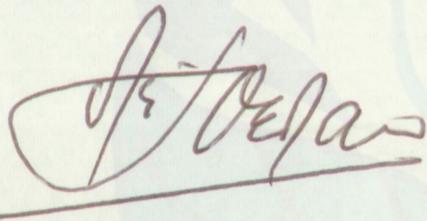
NIM : 000810101126

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

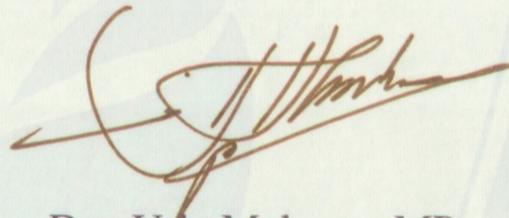
Tanggal Persetujuan : Mei 2006

Pembimbing I



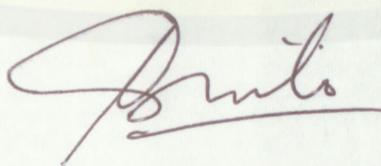
Drs. Bambang Yudono, MM
NIP. 130 355 409

Pembimbing II



Drs. Urip Muharso, MP
NIP. 131 120 333

Ketua Jurusan



Drs. J. Sugiarto, SU
NIP. 130 610 494

JUDUL SKRIPSI

**PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN MELALUI PEMILIHAN SEKTOR-SEKTOR
EKONOMI PRIORITAS BERBASIS PERTANIAN DI KABUPATEN
SITUBONDO**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Iwan Raharjo
NIM : 000810101126
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal:

27 Mei 2006

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Tim Penguji

Ketua	:	<u>Dr. Rafael Purtomo Somaji, MSi</u> NIP. 131 793 384	:
Sekretaris	:	<u>Siswoyo Hari Santoso, SE, M.Si</u> NIP. 132056 182	:
Anggota	:	<u>Drs. Bambang Yudono, MM</u> NIP. 130 355 409	:



Mengetahui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. H. Sarwedi, MM
NIP. 131 276 658

PERSEMBAHAN

Adanya niat yang tulus dan ikhlas kupersembahkan karya tulis ilmiah ini untuk:

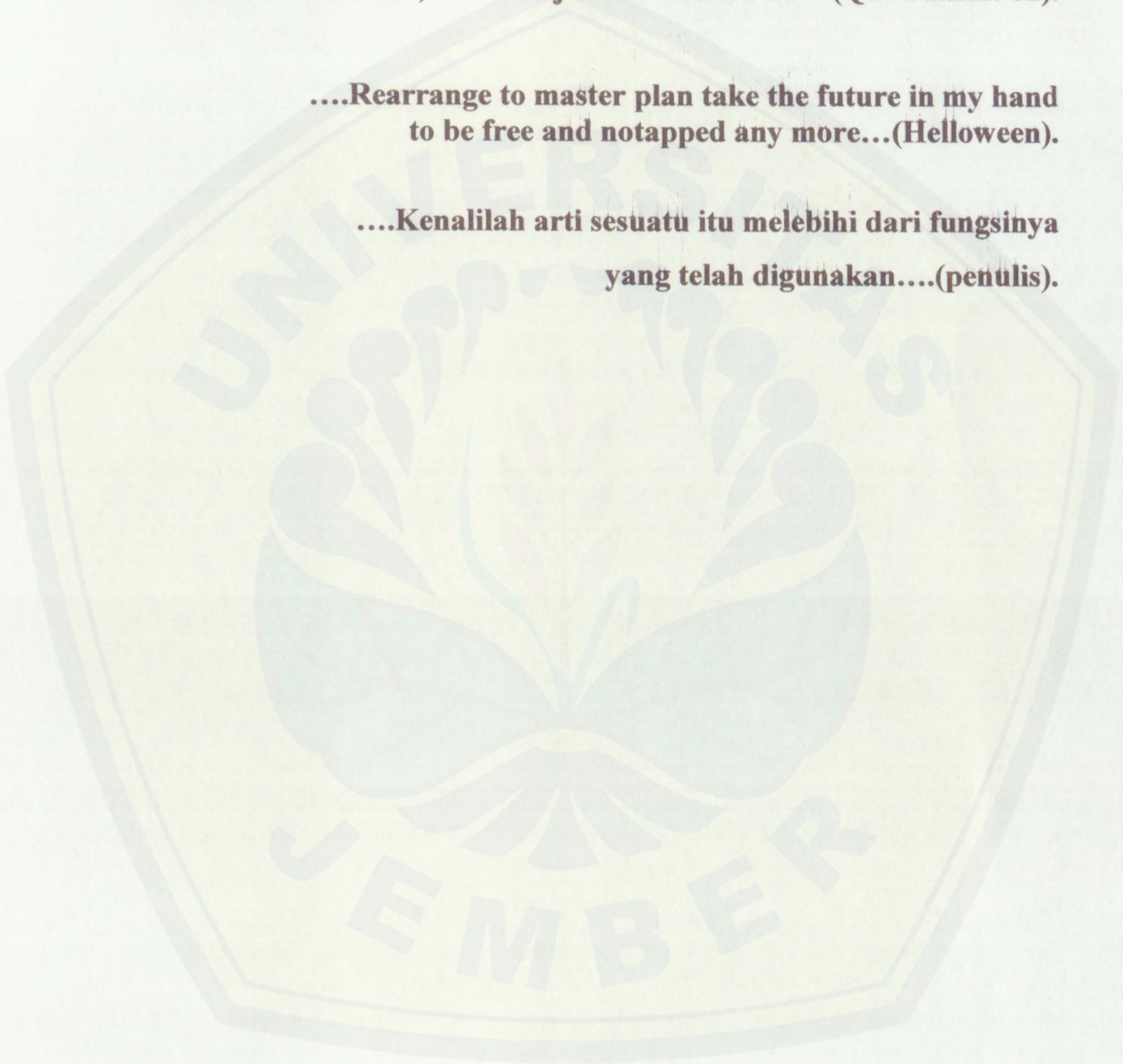
1. Keluargaku di rumah yang amat kucintai dan kusayangi yang telah rela berkorban demi kebahagiaan hidupku.
2. Almamater yang kubanggakan.
3. My Helloween yang telah memberikan semangat, inspirasi, dan suasana romantis dalam menghalau segala duka lara di hati.
4. Semua yang telah menjadi “guru” dalam hidupku semenjak Aku dilahirkan ke dunia sampai Aku mati.

MOTTO

“Sesungguhnya amar-Nya, apabila Dia menghendaki sesuatu dengan berkata: “Jadilah!”, maka terjadilah sesuatu itu”. (QS. Yaasin: 82).

....Rearrange to master plan take the future in my hand to be free and notapped any more...(Helloween).

....Kenalilah arti sesuatu itu melebihi dari fungsinya yang telah digunakan....(penulis).



ABSTRACT

By Iwan Raharjo

Advisor I : Drs. Bambang Yudono, M.M

Advisor II : Drs. Urip Muharso, M.P

The regency of Situbondo is well known as a region with its Pasir Putih shore. Almost in every region at Situbondo has its shore. Agricultural sector is basic sector in order to provide Gross National Product Brutto which is in the long term does not has to hanging only on one sector (agricultural sector), it is because of this basic sector would be experiencing the decreasing return to scale. For that reason, it is necessarily to develop the priority sector of economy to stand beside the basic sector to build the economy buildings at Situbondo.

The goal of this thesis writing is to find out the economy sectors having priorities in developing the economy buildings at Situbondo. This thesis is an analytical thesis that it means the research is using analysis tools in supporting the discussions, and the results are presented in descriptive. The population of this thesis is including all of the activities on the economy sector at Situbondo.

The method of analysis is using Location Quotation and The Coefficient of Friction of Archelus which consist of 3 (three) analysis tools, The Coefficient of National/Regional Growth Component, The Coefficient of Industrial Mix Component, and The Coefficient of The Competitive Effect Component.

The research is using the secondary data through the data from the central bureau of statistics of Situbondo and the central bureau of statistics of east java province.

Based on the LQ there are 3 (three) economy sectors at Situbondo that proper to gave the priority, such as the agricultural sector, the trading sector, hotel and restaurant, and the financial sector, loan and company service. The results from the analysis of The Coefficient of National/Regional Growth Component, The Coefficient of Industrial Mix Component, and The Coefficient of The Competitive Effect Component, shows the agricultural sector, the trading sector, hotel and restaurant, and the financial sector, loan and company service, because of these three economy sector having the highest positive value than the other economy sector at Situbondo.

Key words : the priority sector of economy at Situbondo.

ABSTRAKSI

Oleh : Iwan Raharjo

Pembimbing I : Drs. Bambang Yudono, MM
Pembimbing II : Drs. Urip Muharso, MP

Kabupaten Situbondo merupakan daerah yang cukup dikenal dengan sebutan Daerah Wisata Pantai Pasir Putih. Hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Situbondo terdapat daerah pantai. Sektor pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Situbondo, dikarenakan sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap kontribusi PDRB Kabupaten Situbondo yang mana dalam jangka panjang tidak harus bergantung pada salah satu peranan sektor basis (sektor pertanian) saja, karena sektor basis ini akan mengalami *decreasing return to scale*. Untuk itu diperlukan sektor ekonomi prioritas untuk dikembangkan mendampingi sektor basis dalam membangun pembangunan perekonomian di Kabupaten Situbondo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang perlu diprioritaskan dalam pengembangan pembangunan perekonomian di Kabupaten Situbondo secara berkelanjutan. Jenis penelitian ini adalah bersifat analistis yaitu penelitian ini menggunakan peralatan analisis dalam membangun pembahasannya, dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh aktivitas sektor ekonomi di Kabupaten Situbondo.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *Location Quotion* dan analisis Koefisien Pergeseran *Archelus* yang terdiri dari tiga alat analisis yaitu, Koefisien Komponen Laju Pertumbuhan, Koefisien Komponen Bauran Industri, dan Koefisien Komponen Kedudukan Kompetitif.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu melalui data-data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo dan Biro Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan analisis *LQ* terdapat tiga sektor ekonomi di Kabupaten Situbondo yang patut untuk diprioritaskan, antara lain sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Hasil dari analisis Koefisien Komponen Laju Pertumbuhan, Koefisien Komponen Bauran Industri, dan Koefisien Komponen Kedudukan Kompetitif menunjukkan sektor pertanian, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, karena ketiga sektor ekonomi tersebut memiliki nilai positif tertinggi dibandingkan dengan sektor ekonomi yang lainnya di Kabupaten Situbondo.

Kata kunci : Sektor ekonomi prioritas di Kabupaten Situbondo.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamiin segala puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat yang tiada ternilai sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini tetap dalam keadaan iman dan taqwa. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir jaman.

Penulis menyadari dalam menyusun karya ilmiah ini tidaklah menjadi baik tanpa adanya bantuan atau dukungan dari pihak-pihak yang telah rela meluangkan waktu, pikiran, tenaga bahkan biaya demi terselesaikannya karya ilmiah ini berupa skripsi yang berjudul "Pengembangan Perkonomian Melalui Pemilihan Sektor-sektor Ekonomi Prioritas Berbasis Pertanian di Kabupaten Situbondo". Untuk itu penulis sangat berterimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Yudono, MM selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Urip Muharso, MP selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasihat dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan baik, juga nasihat mengenai manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam bermasyarakat.
2. Bapak Dr. H. Sarwedi, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak Drs. J. Sugiarto, SU selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah menyalurkan ilmunya dengan ikhlas, sabar dan penuh rasa tanggungjawab, semoga semua amal ibadahnya dibalas oleh Allah SWT dengan limpahan rahmat yang lebih besar.
5. Bapak Tri Erwandi, SE di BPS Kabupaten Situbondo atas bantuan data-data dan informasi.
6. Bapak Ir. Purnomo, MSi di BAPPEKAB Situbondo atas penyediaan data dan informasi.
7. Pihak LEMLIT Universitas Jember dan BAKESBANG Kabupaten Situbondo yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.

8. Orang tuaku (Bapak dan Ibu) dan keluarga di rumah yang selalu memberikan semangat dalam menjalani hidup di dunia, serta kasih sayang yang tiada ternilai sampai akhir hayat.
9. Arris W. P, SE, Kartono, SE, Luqman “Embah” B. A, SE, Bario “Bruce” T. P, Safril M, yang selalu membuat suasana penuh tawa, serta teman-teman IESP seperjuangan.
10. Kawan-kawan kost L_U dengan L_U FC-nya mulai awal sampai akhir, yang selalu dalam kekompakan.
11. Pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya semua kritik dan saran dari pembaca diharapkan oleh penulis demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Mei 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PESEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAKSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Perumusan Masalah	9
1.4 Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2 Kegunaan Penelitian.....	10
2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Ekonomi Regional	11
2.1.2 Kutub Pertumbuhan	12
2.1.3 Teori Pembangunan Seimbang dan Teori Pembangunan Tidak Seimbang.....	17
2.1.4 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah	19
2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya	22

3. METODE PENELITIAN	24
3.1 Rancangan Penelitian	24
3.1.1 Jenis Penelitian	24
3.1.2 Unit Analisis	24
3.1.3 Populasi	24
3.1.4 Lokasi Penelitian	24
3.2 Prosedur Pengumpulan Data	24
3.3 Metode Analisis Data	25
3.3.1 Analisis <i>Location Quotion</i>	25
3.3.2 Analisis Pergeseran <i>Archelus</i>	26
3.3.3 Asumsi-asumsi yang Digunakan Dalam Analisis	30
3.3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran	31
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Wilayah	32
4.1.1 Keadaan Geografis	32
4.1.2 Keadaan Demografi.....	33
4.1.3 Tinjauan Ekonomi Kabupaten Situbondo	35
4.1.4 Pendapatan Per Kapita	38
4.1.5 Ketenagakerjaan	38
4.1.6 Potensi Sektoral	40
4.2 Analisis Data	52
4.2.1 Sektor Prioritas	52
4.3 Pembahasan	58
5. KESIMPULAN	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62

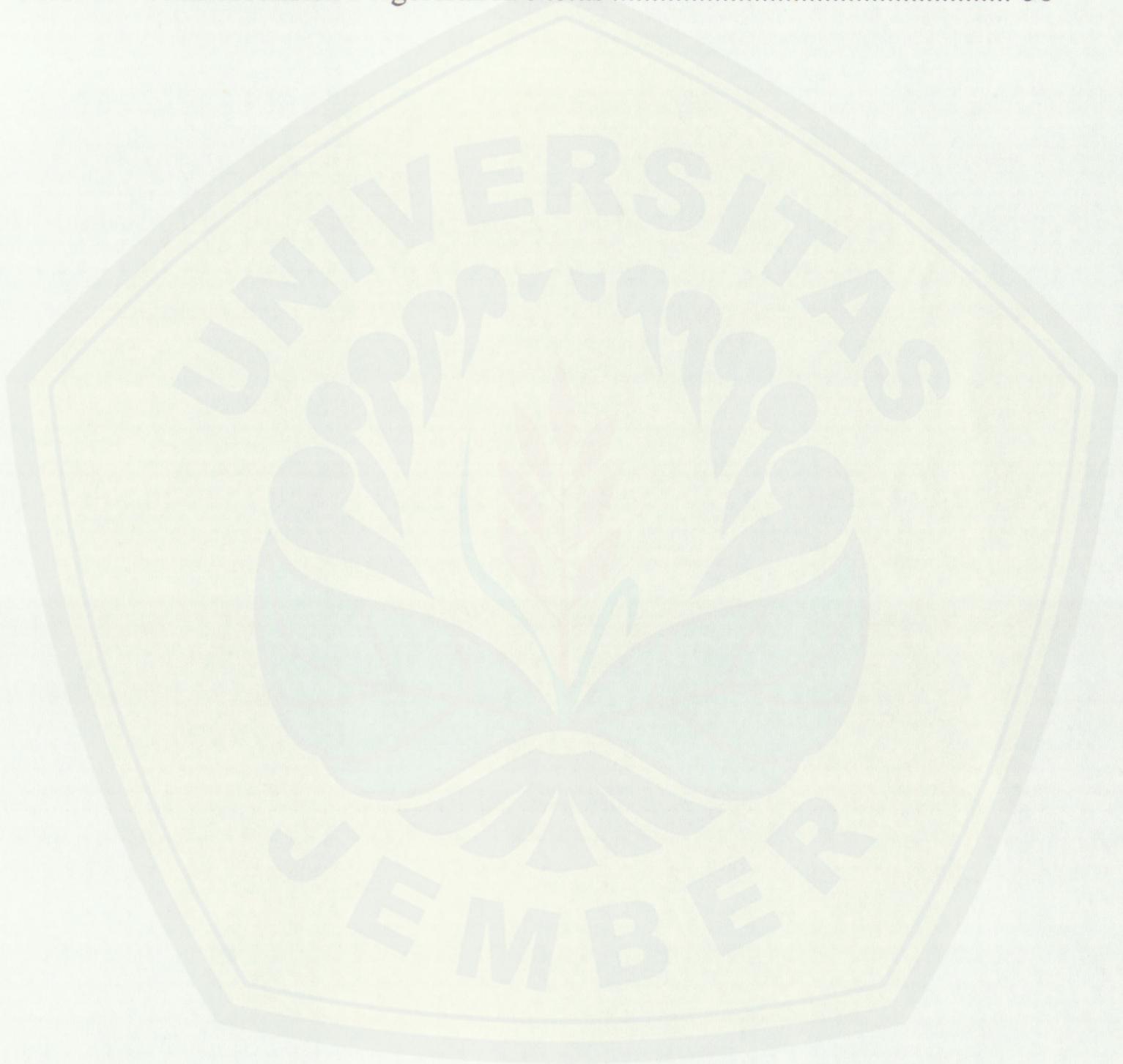
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 : Jumlah Penduduk Di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio per Wilayah Kecamatan Tahun 2003 (jiwa)	33
Tabel 2 : Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo Menurut Jenis Kelamin Tahun 1999 – 2003	34
Tabel 3 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB Kabupaten Situbondo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1999 – 2003 (persen).....	36
Tabel 4 : Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Kabupaten Situbondo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1999 – 2003 (persen).....	37
Tabel 5 : Proporsi Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Berdasarkan Sektor Perekonomian Tahun 1999 – 2003 (Persen)	39
Tabel 6 : Proporsi Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Sektor Perekonomian Tahun 1999 – 2003 (Persen)	39
Tabel 7 : Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi dan Palawija Tahun 2003	40
Tabel 8 : Luas Penanaman Baru dan Produksi Sayur-sayuran Menurut Jenisnya Tahun 2002 – 2003	41
Tabel 9 : Populasi Ternak dan Unggas Menurut Jenisnya (Ekor) Tahun 1999 – 2003	42
Tabel 10 : Perkembangan Produksi Ikan Olahan per Triwulan Tahun 2001 – 2003 (Ton).....	43
Tabel 11: Produksi dan Nilai Komoditi Hasil Hutan Menurut Jenisnya Tahun 2003.....	44
Tabel 12 : Perkembangan Jumlah Industri Menurut Jenisnya dan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 1999 – 2003	46
Tabel 13 : Banyaknya KUD Menurut Unit Keegiatannya Tahun 1999 – 2003.....	48
Tabel 14 : Perkembangan Rata-rata Tarif Hotel Menurut Fasilitas Kamar Tahun 1999 – 2003	49

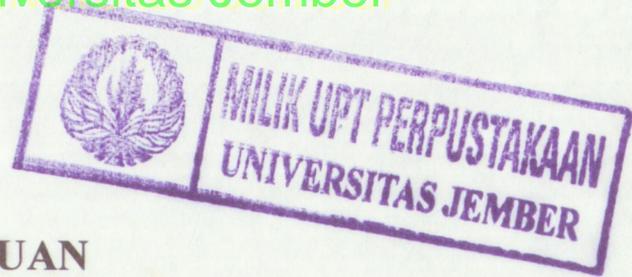
Tabel 15 : Produksi dan Sarana Telekomunikasi Tahun 2003	50
Tabel 16 : Banyaknya Pemilik SIUP Menurut Golongan Usaha	51
Tabel 17 : Peranan Sektor Jasa-jasa Tahun 2000 – 2003 (persen)	52
Tabel 18 : Nilai <i>LQ</i> Sektor Prioritas Di Kabupaten Situbondo Tahun 1999 - 2003	53
Tabel 19 : Nilai Koefisien Pergeseran <i>Archelus</i>	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 : Faktor-faktor Penentu Dalam Pembangunan Industri Suatu Daerah ..	20
Gambar 2 : Penilaian Kemampuan Industri Suatu Daerah.....	22





1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program pembangunan di segala bidang telah digalakkan oleh pemerintah Indonesia melalui penetapan kebijaksanaan yang bertumpu pada pola pembangunan dengan keseimbangan yang dinamis, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diikuti dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi segenap lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembagiaan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan landasan yang kuat yaitu pengambilan kebijakan yang tepat, akurat, terarah, sesuai dengan prioritas dan potensi pembangunan di masing-masing wilayah (Nuryasman, 1996: 239).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses peralihan (transisi) dari satu tingkat ekonomi tertentu yang masih bercorak sederhana menuju ke tingkat ekonomi yang lebih maju mencakup kegiatan yang beraneka ragam. Rostow memakai pendekatan sejarah dalam menjelaskan proses perkembangan ekonomi. Beliau membedakan adanya lima tahap pertumbuhan ekonomi yaitu (1) masyarakat tradisional, (2) prasyarat untuk tinggal landas, (3) tinggal landas, (4) dewasa (*maturity*), (5) masa konsumsi massal (Jhingan, 2003: 142). Dalam transisi tersebut terlaksana suatu transformasi yang berarti perubahan pada pertimbangan-pertimbangan keadaan yang berkisar pada landasan kegiatan ekonomi dan melekat pada tata susunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat (Djojohadikusumo, 1994: 90).

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Apabila suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki oleh semua daerah agar tercipta suatu pembangunan ekonomi daerah yang positif, maka pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada di suatu daerah tersebut (Arsyad, 1992: 108). Untuk itu pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Tahun 2004 telah dikeluarkan Undang-

Undang tentang Otonomi Daerah yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Ada beberapa faktor kemampuan daerah untuk mempengaruhi pelaksanaan Otonomi Daerah antara lain; faktor sumberdaya manusia sebagai pelaku Otonomi Daerah, faktor kemampuan keuangan daerah, faktor sarana dan prasarana serta faktor organisasi dan manajemen pemerintah daerah. Daya dukung keuangan dalam kegiatan pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting, karena jika sumber keuangan tersedia makin banyak kemungkinan kegiatan dapat dilaksanakan.

Pembangunan wilayah melalui strategi pengembangan sektor-sektor prioritas telah lama diyakini oleh para pembuat kebijakan pembangunan wilayah, mampu untuk memperluas lapangan kerja, menghasilkan devisa negara melalui ekspor dan menghemat devisa negara melalui substitusi impor. Sektor industri berperan sebagai dinamisator yang akan membawa seluruh sektor perekonomian pada tingkat laju pertumbuhan yang lebih tinggi, sektor industri juga menjadi motor dalam banyak hal, misalnya, sebagai jalan pemecahan masalah ketenagakerjaan, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang-barang, melepaskan ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan nilai ekspor. Sektor perekonomian dikatakan baik untuk dikembangkan apabila sektor tersebut mampu menyebabkan suatu arus yang ekstensif dari suatu produk yang diperlukan oleh seluruh sektor perekonomian daerah, nasional maupun internasional (Kuncoro, 1996:18).

Peningkatan angka pertumbuhan ekonomi harus dipertahankan. Penyusunan program pembangunan adalah suatu langkah penting dalam suatu sistem perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, Kabupaten Situbondo membutuhkan suatu perencanaan pembangunan yang matang, selaras dengan kebijakan Otonomi Daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah sudah mulai diyakini kepentingannya oleh masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya

yang ada atau tersedia dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1992:108). Perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan dengan melihat kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan, dan mempertimbangkan aspek hubungan daerah. Demi mewujudkan pembangunan daerah yang merata ke seluruh wilayah Indonesia maka pembangunan daerah harus dilakukan dengan melalui kebijaksanaan dan program pembangunan sektoral yang disesuaikan dengan potensi dan permasalahan daerah masing-masing. Pola kebijakan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lain, untuk itu perlu dilakukan penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah yang bersangkutan. (Arsyad, 1992:122).

Pemilihan secara tepat terhadap sektor-sektor yang berperan penting dan mendapat prioritas untuk dikembangkan lebih dahulu di suatu daerah diperlukan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Prioritas tersebut dapat ditentukan dengan melihat keterkaitan salah satu sektor dengan sektor-sektor lainnya serta melihat sektor penghasil nilai ekspor yang besar. Hal ini berarti, selain pengembangan salah satu sektor dapat mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang saling menunjang dan melengkapi antar sektor juga dapat memberikan surplus neraca pembangunan sebesar-besarnya, sehingga dapat dipergunakan untuk akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi selanjutnya (Irawan dan Suparmoko, 1992: 265).

Secara ekonomis sektor unggulan yang dipilih harus memiliki struktur perilaku dan kinerja yang baik. Dari struktur, ekonomi tersebut harus memiliki derajat keterkaitan yang relatif paling tinggi dibanding dengan sektor yang lain, baik dari keterkaitan ke depan (*forwad linkage*) maupun keterkaitan ke belakang (*backward linkage*). Dari sisi perilaku, sektor unggulan adalah sektor yang memiliki dampak pengganda (*multiplier effect*) yang paling besar, baik terhadap out put, pendapatan, maupun penyerapan tenaga kerja. Sedangkan kinerja sektor

tersebut dapat dinilai berdasarkan derajat ketergantungan ekspor serta dampak pengganda ekspor terhadap output dan tenaga kerja (Kuncoro, 1996:18).

Struktur perekonomian yang menggerakkan ekonomi Kabupaten Situbondo meliputi 9 sektor yaitu: sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan sektor jasa-jasa. Dalam jangka panjang, suatu perekonomian tidak dapat tetap menggantungkan pada peranan salah satu sektor (sektor basis), karena suatu saat sektor basis akan mengalami proses *decreasing return to scale*, sehingga timbul kendala untuk secara terus menerus pula meningkatkan produksinya.

Kriteria utama keberhasilan pembangunan daerah dalam bentuk PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan daerah tertentu dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah itu. Pencerminan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Situbondo yang terdapat pada Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 1993, pada tahun 2001 sebesar Rp 889.401,03 juta menjadi Rp 915.892,38 juta pada tahun 2000, dengan demikian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan dari sebesar 2,69 persen pada tahun 2001 menjadi sebesar 2,98 persen pada tahun 2002 (BPS Kabupaten Situbondo, 2003).

Pertumbuhan yang masih relatif rendah ini, disebabkan kondisi perekonomian yang belum normal kembali dan dirasakan masih tingginya tingkat harga yang terjadi. Hal tersebut berakibat produksi di beberapa sektor ekonomi mengalami stagnasi atau kenaikan produksi yang lamban yang disebabkan tingkat harga yang tinggi terhadap biaya produksi yang dirasakan oleh unit-unit ekonomi untuk skala menengah ke bawah.

Tahun 1999 dan tahun 2000 pertumbuhan ekonomi mulai tumbuh positif, hanya masih relatif kecil berkisar 2 persen lebih, diantaranya disebabkan oleh kondisi perekonomian yang masih belum kembali normal, yang ditandai dengan masih tingginya tingkat harga dan tingginya kurs dollar AS terhadap rupiah.

Secara keseluruhan masih berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena rata-rata pertumbuhan penduduk pada tahun 2002 hanya 0,53 persen.

Bila dilihat dari kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap besarnya PDRB, sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang terbesar, tahun 2001 sebesar 34,58 persen, pada tahun 2002 sebesar 37,42 persen. Namun dalam tahap jangka panjang, suatu perekonomian tidak dapat tetap menggantungkan pada peranan salah satu sektor basis (sektor pertanian), karena suatu saat sektor basis akan mengalami proses *decreasing return to scale*. Sehingga timbul kendala untuk secara terus-menerus meningkatkan produksinya.

Sektor basis tersebut harus didampingi oleh sektor-sektor ekonomi yang lain yang dimiliki oleh Kabupaten Situbondo. Dalam memilih pendamping sektor basis untuk dijadikan sektor prioritas dalam membangun ekonomi di Kabupaten Situbondo dengan pendekatan kontribusi PDRB digunakan analisis *Location Quotion* (Yuwono, 1994). Sedangkan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Situbondo yang mendampingi sektor basis digunakan pendekatan yang berdasarkan ketersediaan faktor tenaga kerja adalah Koefisien Pergeseran *Archelus* (Kotler, 1993).

1.2 Identifikasi Masalah

Keberadaan sektor pertanian dengan segala keberadaannya dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Situbondo tidak dapat menjadi satu-satunya sektor yang dapat diutamakan, walaupun sektor ini menjadi sektor basis di Kabupaten Situbondo. Dalam kenyataannya, dilihat dari PDRB Kabupaten Situbondo sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang terbesar diantara sektor-sektor ekonomi yang lain. Potensi subsektor pertanian di Kabupaten Situbondo yang memberikan kontribusi terbesar diantaranya adalah produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan laut, tambak *hatchery*, peternakan dan kehutanan, utamanya hutan Jati di Kecamatan Banyuputih, Kendit dan sebagian terbesar di beberapa kecamatan lainnya.

Produksi pertanian tanaman pangan di antaranya adalah padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, buah-buahan utamanya mangga, dan sayur-sayuran. Produksi tanaman pangan di tahun 2003 dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk beberapa komoditi mengalami kenaikan dan beberapa mengalami penurunan. Komoditi yang mengalami kenaikan hanyalah komoditi padi sawah dan padi gogo/tegal. Komoditi yang mengalami penurunan produksi diantaranya meliputi jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau dan kedelai.

Subsektor tanaman pangan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2000 mencapai 12,46 persen menjadi 11,20 persen pada tahun 2003. Subsektor tanaman perkebunan juga mengalami penurunan dari 4,28 persen di tahun 2000 menjadi 3,91 persen pada tahun 2003. Subsektor kehutanan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2000 mencapai 0,48 persen menurun 0,38 pada tahun 2003. Subsektor peternakan juga mengalami penurunan yaitu pada tahun 2000 sebesar 2,39 menjadi 2,78 persen pada tahun 2003. Subsektor perikanan yang mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2000 sebesar 1,50 persen menjadi 1,74 persen pada tahun 2003 (BPS Kabupaten Situbondo: 2003).

Adanya kekhawatiran sektor basis bukan merupakan satu-satunya sektor ekonomi yang diandalkan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Situbondo. Sebagai pembanding pada tahun 1998 sektor pertanian di Kabupaten Bondowoso menyumbang 58,63 persen pada penyerapan tenaga kerja dengan nilai *LQ* 1,25. Tahun 2003 menyumbang 61,43 persen dengan nilai *LQ* tetap 1,25 (tesis, Urip Muharso : 2004). Hal tersebut menunjukkan peranan sektor pertanian dalam proporsi penyerapan tenaga kerja pada perekonomian daerah meningkat namun relatif kurang disertai dengan meningkatnya keunggulan komparatif yang sebanding dengan peningkatan proporsi penyerapan tenaga kerja tersebut. Kekhawatiran tersebut beralasan karena sektor perekonomian tersebut kurang mampu meningkatkan besaran *Location Quotient*-nya yang menggambarkan kemampuan sektor perekonomian tersebut untuk meningkatkan kemampuan mengekspor komoditi yang dihasilkannya ke luar daerah. Dalam jangka panjang, suatu perekonomian tidak dapat tetap menggantungkan pada

peranan salah satu sektor (sektor basis), karena suatu saat sektor basis akan mengalami proses *decreasing return to scale*, sehingga timbul kendala untuk secara terus menerus pula meningkatkan produksinya.

Sektor industri sangat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo. Keberadaan industri di Kabupaten Situbondo baik Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga (IKKR) maupun Industri Besar/Sedang (IB/S) perlu terus mendapat perhatian dan dikembangkan. Jumlah keseluruhan dari industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang ada sebanyak 25.277 sedangkan industri Besar/Sedang (jumlah TK 20 ke atas) sebanyak 91 perusahaan. Jumlah tersebut turun 8,75 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena dampak kondisi krisis yang belum pulih.

Jenis Industri Kecil yang ada diantaranya industri makanan/minuman, genteng, perhiasan, kemasan, anyaman, bata, dan lainnya. Walaupun sektor industri terlihat menurun, akan tetapi jumlah tenaga kerja yang terserap cukup banyak. Hal ini berarti menunjukkan perkembangan dan perlu terus dikembangkan, mengingat sumber daya alam yang ada cukup memadai seperti kerajinan dari kerang, kayu jati, *surving* dan industri lainnya.

Industri Besar/Sedang yang ada cukup banyak menyerap tenaga kerja, utamanya pada industri minuman/makanan, seperti pabrik gula sebanyak lima (5) buah, pabrik tapioka, mebel, pemindangan, selep atau penggilingan, pengolahan kapas, industri mie/sohun, industri kecap, industri tahu dan lainnya. Jumlah tenaga kerja pada Industri Besar/Sedang yang aktif sebanyak 6.074 naik sebesar 3,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan persentase jumlah tenaga kerja di sektor Industri Besar/Sedang disebabkan pula oleh kondisi perekonomian yang belum stabil, akibat naiknya harga barang yang cukup tinggi, sehingga biaya produksi menjadi semakin besar. Bila dilihat dari sumbangan PDRB sektor industri menyumbang sebesar 26,35 persen merupakan penyumbang terbesar ketiga setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Namun keberadaan sektor pertanian dengan segala peranannya dalam mengembangkan perekonomian baik dalam skala nasional, provinsi maupun daerah harus tetap dipertahankan terutama sebagai input dan sumber permintaan

efektif bagi produk-produk sektor lainnya. Dalam hal ini Kota Situbondo memiliki rencana untuk mengembangkan sektor-sektor perekonomian yang lain yang ke depan dengan efek ramifikasinya (efek berantai) dapat mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi produksi terutama aktivitas agroindustri, yakni aktivitas yang mengolah lebih lanjut bahan mentah yang merupakan hasil-hasil budidaya pertanian dan aktivitas-aktivitas lain yang berkaitan (*on farm or off farm*). Akan tetapi pengembangan di suatu sektor tidaklah dapat dilakukan secara terpisah. Pengembangan kapasitas produksi di suatu sektor haruslah diikuti dengan perluasan kapasitas produksi di sektor lain yang mendukung permintaan industrinya. Contoh negara yang menunjukkan bahwa selama krisis ekonomi juga terbukti sektor pertanian masih mampu mengalami laju pertumbuhan yang positif, walaupun dalam persentase yang kecil, Jepang salah satu contoh negara di kawasan Asia yang memulai industrialisasi bersamaan dengan revolusi pertanian yang terjadi melalui reformasi agraria (restorasi Meiji). Demikian pula di Taiwan pada tahun 1950-an yang menunjukkan bahwa industrialisasi berbasis pertanian melalui pengembangan industri berskala kecil dan berlokasi di pedesaan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan merata serta struktur ekonomi yang tangguh (Simatupang dan Syafa'at, 2000, dalam Tambunan).

Sektor pertanian di Kabupaten Situbondo merupakan sektor basis, hal ini dikarenakan sektor pertanian di Kabupaten Situbondo merupakan penyumbang terbesar kontribusi PDRB. Selain itu, infrastruktur terhadap sektor perekonomian sangat mencukupi. Berbagai lembaga pemerintah yang menangani sektor pertanian sudah berkomunikasi baik dengan masyarakat. Selain hal tersebut distribusi hasil pertanian dari lokasi ke daerah pemasaran dapat dilalui dengan baik, hal ini dikarenakan sarana transportasi yang menghubungkan antar daerah baik antar desa, kecamatan maupun antar kota dapat dilalui dengan baik. Teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hasil dari sektor pertanian. Sejauh ini di Kabupaten Situbondo telah menggunakan teknologi yang setara dengan daerah-daerah lain yang lebih maju (Jember) dalam mengolah sektor ekonomi pertanian untuk lebih berkualitas. Untuk itu sektor pertanian di Kabupaten Situbondo menjadi sektor basis yang didampingi sektor-

sektor ekonomi lainnya dapat mengembangkan pembangunan perekonomian di Kabupaten Situbondo.

1.3 Perumusan Masalah

Sektor pertanian sebagai sektor basis di Kabupaten Situbondo yang dalam jangka panjang akan mengalami proses *decreasing return to scale* perlu dan harus dikembangkan demi meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Situbondo, yaitu sebagai output atas permintaan pemenuhan kebutuhan masyarakat yaitu sebagai barang konsumsi, dan juga sebagai permintaan efektif dari sektor industri yaitu sebagai input dalam proses produksinya.

Diperlukan penelitian yang mendalam tentang keadaan setiap daerah (khususnya di Kabupaten Situbondo) untuk mendapatkan formulasi dan informasi, solusi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan, serta pemilihan suatu kebijakan yang tepat dan terarah untuk menetapkan sektor-sektor pendamping sektor basis yang mampu diprioritaskan sebagai pendorong perkembangan pembangunan ekonomi daerah. Perbedaan karakteristik ekonomi antar sektor di Kabupaten Situbondo mengakibatkan setiap sektor akan berubah dan tumbuh dengan laju yang tidak sama. Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah adalah mencari sektor-sektor ekonomi non pertanian yang diprioritaskan sebagai pendamping sektor basis guna meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Situbondo. / ?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi non pertanian yang perlu diprioritaskan untuk mendampingi sektor basis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo agar perekonomian di daerah tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai :

- a. Bahan pertimbangan bagi perencana dan pelaksana pembangunan daerah terutama dalam menentukan garis kebijakan di wilayah Kabupaten Situbondo.
- b. Bahan kajian dan informasi bagi peneliti lain yang berminat meneliti masalah yang berkaitan.
- c. Pembanding kepada para peneliti yang lain yang mengambil penelitian dengan tema permasalahan yang sama di tempat dan kesempatan yang lain.
- d. Memberikan masukan bagi semua pihak yang membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini.
- e. Pelaku ekonomi baik pemerintah maupun pihak swasta.



2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Ekonomi Regional

Ekonomi regional merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang membahas permasalahan ekonomi berupa telaah mengenai daerah sebagai organ yang dinamis. Dalam perkembangannya ekonomi regional merupakan jawaban yang tepat terhadap kebekuan ilmu ekonomi ortodoks yang hanya mengulas permasalahan ekonomi dari satu sisi berupa tingkat penawaran dan permintaan satu produk baik berupa barang dan jasa.

Permasalahan struktur ekonomi yang tidak dibahas oleh para ekonom ortodoks merupakan bagian krusial yang dibahas dalam telaah ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional telah muncul dan dikenal pada akhir 1940-an di Amerika Serikat, permasalahannya dimulai dari ketidakpuasan para ahli ekonomi regional terhadap telaah permasalahan region yang konservatif. Perhatian ekonomi regional lebih dari sekedar membahas pemecahan masalah regional yang konservatif seperti urbanisasi dan migrasi penduduk tetapi juga permasalahan regional yang bersifat multi dimensi.

Dengan pentingnya minat dan adanya permasalahan daerah atau regional maka pada tahun 1945 di Amerika Serikat terbentuk Asosiasi Ahli Telaah Ekonomi Regional (Isard dalam Fibryani, 2005: 8). Adapun Isard sendiri mendefinisikan ekonomi regional sebagai sebagai: pertama, ilmu ekonomi regional adalah suatu telaah mengenai regional atau sistem dalam region sebagai organisasi yang dinamis. Kedua, ekonomi regional adalah sintesa dan analisis yang dipadukan antara politik, ekonomi, sosiologi, kebudayaan dan kejiwaan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi region atau sistem region. Ketiga, ilmu ekonomi regional adalah telaah secara menyeluruh melalui berbagai disiplin ilmu tersebut (Isard dalam Fibryani, 2005: 9).

Perencanaan pembangunan wilayah (*Region Development of planning*) merupakan ilmu yang relatif baru sehingga dalam perencanaan sektoral dirumuskan kebijaksanaan dari program perencanaan pembangunan menurut

sektor pembangunan itu sendiri tanpa memperhatikan kegiatan ini akan dilakukan pada daerah mana.

2.1.2 Kutub Pertumbuhan

Menurut Francois Perroix, daerah-daerah yang terletak dalam suatu wilayah yang luas tidaklah berkembang dalam intensitas dan kecepatan yang sama, dalam arti terdapat daerah yang mampu berkembang lebih cepat dari pada yang lainnya dan yang lainnya tertinggal. Daerah yang memiliki faktor penentu dan faktor pendorong yang lebih banyak akan mampu berkembang lebih cepat dari pada daerah yang lain, dan sebaliknya daerah yang kurang memiliki faktor penentu dan pendorong akan relatif tertinggal dari daerah yang lain (Glasson, 1977).

Faktor-faktor penentu perkembangan daerah adalah faktor-faktor yang ada di balik penawaran dan permintaan seperti tersedianya tenaga kerja yang banyak dengan tingkat produktivitas yang relatif tinggi dan tingkat upah yang relatif lebih murah, pendapatan per kapita penduduk yang lebih tinggi dan sebagainya. Sedangkan faktor pendorong adalah faktor-faktor yang ikut mempengaruhi intensitas kecepatan perkembangan daerah selain faktor penentu seperti lokasi daerah yang relatif menguntungkan, motivasi atau dorongan untuk maju yang kuat dari masyarakatnya dan sebagainya. Daerah yang mampu berkembang cepat akan menjadi daerah pusat pertumbuhan dan yang kurang mampu berkembang menjadi daerah *hinterland*.

Sebagai akibatnya terjadilah pandangan mengenai pembagian kerja antar daerah (*interregional division of labour*), dimana daerah-daerah yang relatif kaya ketersediaan faktor produksi kapital akan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dengan relatif padat faktor produksi kapital dan daerah-daerah yang relatif kaya ketersediaan faktor produksi tenaga kerja akan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dengan relatif padat faktor produksi tenaga kerja seperti hasil-hasil sektor pertanian (Glasson, 1977: 21).

Kecenderungan perdagangan tersebut kemudian akan disertai dengan proses penyebaran pertumbuhan ekonomi dari daerah maju ke daerah kurang

maju atau pedesaan lewat perdagangan antar daerah, dalam arti pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah-daerah yang maju akan menyebar ke daerah yang kurang maju lewat pertukaran barang-barang dan jasa-jasa yang mekanisme transmisinya telah dijelaskan oleh teori pada umumnya (Heckscher-Ohlin) yang menekankan pada perbedaan relatif faktor pemberian alam (*endowment factors*) dan atas harga faktor produksi antar negara sebagai determinan perdagangan yang paling penting (dengan asumsi bahwa teknologi dan cita rasa sama) (Salvatore, 1997: 63). Oleh sebab itu, secara teori daerah-daerah yang tersebar dalam wilayah ekonomi substantif yang luas hendaknya memanfaatkan sebesar-besarnya keunggulan komparatifnya. Keunggulan komparatif tersebut adalah keunggulan yang secara ekonomi diperbandingkan dengan daerah yang lain. Hal tersebut perlu dan ditekankan secara teori karena dianggap perekonomian yang berlaku pada daerah-daerah dalam suatu wilayah yang luas adalah perekonomian yang kompetitif, dan yang lebih penting daripada itu adalah untuk menciptakan suatu struktur perekonomian yang komplementer antar berbagai daerah.

Fenomena perkembangan tersebut kemudian berkembang menjadi alat kebijakan pengembangan perekonomian daerah (perencanaan pembangunan ekonomi) baik ditingkat nasional, regional (provinsi) maupun daerah atau tingkat Kabupaten (Arsyad, 1992: 108).

Perencanaan Pembangunan daerah memiliki kepentingan untuk adanya suatu sektor perekonomian yang disebut sektor perekonomian basis. Sektor perekonomian basis dalam hal ini adalah sektor perekonomian yang mampu mengekspor kelebihan hasil produksi karena didukung oleh relatif kelimpahan *endowment factor* yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sektor perekonomian basis itulah yang diharapkan oleh perekonomian daerah menjadi pondasi dasar yang kuat bagi proses penyebaran pertumbuhan ekonomi daerah yang maju yang menjadi pusat pertumbuhan ke daerah yang kurang maju (Arsyad, 1992: 108).

Dengan membangun fungsi-fungsi produksi yang berbasis pada proporsi faktor-faktor produksi yang relatif berbeda dan ditunjang dengan faktor karunia lain yang berbeda pula (seperti ketersediaan sumber daya alam yang relatif melimpah dan berbeda di antara daerah-daerah dalam suatu wilayah yang luas),

maka terciptalah struktur perekonomian yang lebih komplementer di antara berbagai daerah terutama hubungan antara struktur perekonomian daerah *hinterland* dengan perekonomian daerah yang menjadi pusat pertumbuhannya. Dengan cara memanfaatkan sebesar-besarnya keunggulan komparatif tersebut, perkembangan perekonomian suatu daerah akan mendorong perkembangan daerah yang lain.

Seperti disinggung di atas, proses penyebaran tersebut akan berada pada tingkat optimal bila komoditi yang diperdagangkan antar daerah terutama komoditi dari daerah pedesaan diekspor ke daerah yang maju memiliki ciri-ciri yang menguntungkan.

Dengan demikian, ekspor dari komoditi-komoditi yang dihasilkan terutama oleh sektor perekonomian basis akan menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Pendapatan dari ekspor pada tahap permulaan akan diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi di sektor perekonomian basis, yang kemudian dilanjutkan dengan adanya kecenderungan perluasan kapasitas produksi di sektor perekonomian tersebut. Pada tahap selanjutnya melalui bekerjanya proses *multiplier*, kecenderungan tersebut direspon dengan perluasan kapasitas produksi di semua sektor perekonomian dalam perekonomian daerah, sehingga yang terjadi bukanlah perluasan kapasitas produksi di sektor perekonomian basisnya tetapi adalah kecenderungan perluasan kapasitas produksi di semua sektor perekonomian.

Kewajiban perencanaan pembangunan adalah membangun upaya guna meningkatkan *marginal productivity* dari tenaga kerja, karena di bawah kondisi mekanisme pasar, maka kenaikan *marginal productivity* dari tenaga kerja akan mendorong kenaikan upah yang berlaku (Samuelson-Stoppler). Selanjutnya kenaikan upah akan meningkatkan permintaan hasil-hasil dari proses produksi secara keseluruhan.

Jika kondisi tersebut berlangsung di sektor pertanian maka sektor pertanian akan menjadi sumber permintaan efektif bagi sektor-sektor perekonomian yang lain yang sedang dikembangkan yang proses ramifikasinya akan mendorong perkembangan sektor pertanian kembali. Kondisi yang ditandai

dengan perkembangan sektor pertanian relatif diperlukan untuk kembali menempatkan sektor pertanian yang merupakan sektor perekonomian yang paling dominan untuk tetap dapat menjadi sumber permintaan efektif bagi sektor-sektor perekonomian lain yang secara imperatif dikembangkan.

Lebih spesifik Boudeville, dalam Glasson (1977) mendefinisikan *growth poles* sebagai kelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut ke seluruh daerah pengaruhnya.

Pusat pertumbuhan (*growth poles*) dapat diartikan dengan dua cara, (Kadariah, 1985: 61) yaitu:

- a. Arti fungsional dari *growth poles* menggambarkan sebagai kelompok perusahaan, cabang industri atau unsur-unsur dinamis yang menstimulir kehidupan ekonomi. Substansinya adalah adanya permulaan dan serangkaian perkembangan dengan efek *multiplier*-nya.
- b. Arti geografis dari *growth poles* yakni adanya usaha yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berkumpul di suatu tempat, tanpa adanya interaksi antara usaha-usaha tersebut.

Dalam teori kutub pertumbuhan, konsep ekonomi yang penuh adalah:

- a. Konsep *Leading Industries (Industry Motrice)* dari perusahaan propulsip.

Menyatakan bahwa pada pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahaan propulsip yang besar, yang termasuk dalam "*leading industries*" yang mendominasi unit-unit ekonomi lainnya. Ada kemungkinan bahwa suatu kompleks industri hanya terdiri dari satu atau segelintir perusahaan yang dominan.

- b. Konsep Polarisasi

Menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari *leading industries* mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke dalam kutub pertumbuhan. Implisit dalam proses polarisasi ini adalah berbagai macam keuntungan aglomerasi (keuntungan internal dan eksternal).

c. Konsep *Spread Effects*

Menyatakan bahwa pada waktunya, kualitas propulsip dinamik dari kutub pertumbuhan akan memancar ke luar dan memasuki ruang di sekitarnya. Sehingga pada hakekatnya perekonomian merupakan gabungan dari sistem yang secara relatif aktif keadaannya dan industri yang sifatnya relatif lebih pasif. Kumpulan industri yang pertama akan mempengaruhi pembangunan kumpulan industri yang kedua.

Ditinjau dari sifat hubungan antara unsur-unsur yang aktif dengan komponen ekonomis yang lain maka polarisasi dapat dibagi menjadi:

- a. Polarisasi teknis adalah polarisasi yang ditimbulkan karena adanya kaitan (hubungan) teknis antara unsur aktif dalam *growth pole* dengan aktivitas ekonomi yang ditarik. Dalam praktek proses perkembangan ini sering terjadi dalam perusahaan yang sama, semisal dalam perusahaan yang mempunyai integrasi vertikal.
- b. Polarisasi pendapatan adalah polarisasi yang ditimbulkan karena arus pengeluaran dari pendapatan yang berasal dari aktivitas yang pertama. Tingkat polarisasi di daerah ekonomi (*economic region*) dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor:
 1. Besarnya konsumsi regional.
 2. Besarnya arus uang yang ke luar daerah.
 3. Besarnya keuntungan yang ditanam kembali.
 4. Luas dan macam aktivitas ekonomi.
- c. Polarisasi psikologis adalah polarisasi yang ditimbulkan bukan karena adanya hubungan teknis, melainkan orang meniru dan karena banyaknya informasi yang didapat, menyebabkan banyak pengetahuan.
- d. Polarisasi geografis dapat dilihat dari dua sudut:
 1. Sebagai akibat dari adanya proses-proses polarisasi lainnya yang terjadi dalam wilayah regional.
 2. Sebagai akibat dari tindakan pemerintah yang memang ditujukan untuk menimbulkannya.

Sebagai suatu sarana kebijakan teori kutub pertumbuhan cukup menarik untuk diterapkan, dikarenakan oleh:

- a. Berbagai macam keuntungan aglomerasi, teori ini cenderung untuk menjadi suatu cara yang sangat efisien untuk menimbulkan perkembangan;
- b. Dari segi anggaran belanja negara, pemusatan investasi pada titik-titik pertumbuhan tertentu adalah lebih murah daripada pemberian bantuan besar-besaran kepada daerah-daerah yang besar;
- c. “*Spread Effects*” yang ditimbulkan oleh titik pertumbuhan akan membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dialami oleh daerah-daerah yang sedang merosot.

2.1.3 Teori Pembangunan Seimbang dan Teori Pembangunan Tidak Seimbang

Pertumbuhan berimbang didoktrin oleh tokoh-tokoh ekonomi dunia, yaitu Rosentein-Rodan, Ragnar Nurkse, dan Arthur Lewis (M L. Jhingan, 2003: 182) membutuhkan keseimbangan antara berbagai industri barang konsumen, dan antara barang konsumen dengan industri barang modal. Ini juga berarti keseimbangan antara industri dan pertanian dan antara sektor dalam negeri dan sektor ekspor. Lebih lanjut, memerlukan pula keseimbangan antara *overhead* sosial dengan *overhead* ekonomi dan dengan investasi langsung horisontal. Teori pertumbuhan seimbang mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis dari berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama.

Untuk itu diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan yang berfungsi meningkatkan penawaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan mentah, tenaga, pertanian, pengairan, angkutan dan lain-lain. Serta semua industri yang memproduksi barang konsumen. Sebaliknya, sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan lapangan kerja yang lebih besar dan penanbahan penghasilan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh di pihak

penduduk. Sisi ini berkaitan dengan industri yang sifatnya saling melengkapi, industri barang konsumen, khususnya pertanian dan industri manufaktur. Jika semua industri dibangun secara serentak maka jumlah tenaga yang diserap akan sangat besar. Dengan cara ini akan tercipta permintaan barang-barang dari masing-masing industri satu sama lain, dan semua barang akan menjadi habis terjual.

Menurut Nurkse, lingkaran setan kemiskinan yang terjadi di negara terbelakang memperlambat perkembangan ekonomi. Tetapi, jika lingkaran tersebut dipecahkan, perkembangan ekonomi akan menyusul. Lingkaran setan, seperti diketahui, bekerja baik pada sisi penawaran maupun pada sisi permintaan.

Doktrin pertumbuhan seimbang membutuhkan keseimbangan antara berbagai sektor ekonomi. harus ada keseimbangan yang tepat antara investasi di bidang pertanian dan di bidang industri, karena kedua bidang ini bersifat saling melengkapi. Peningkatan output di bidang industri membutuhkan perluasan output di bidang pertanian. Jika pekerjaan di sektor industri meningkat ia akan membawa peningkatan permintaan bahan-bahan makanan. Oleh karena itu penawaran makanan harus ditingkatkan. Bersamaan dengan meluasnya sektor industri tersebut, penawaran bahan mentah juga harus ditingkatkan. Adalah mendesak sifatnya bahwa sektor pertanian harus juga berkembang bersama-sama dengan sektor industri, kalau tidak inflasi akan terjadi.

Teori pertumbuhan tidak seimbang yang didoktrin oleh Hirschman dan Rostow (ML. Jhingan, 2003: 191) adalah lawan dari doktrin pertumbuhan seimbang. Menurut konsep ini, investasi seyogyanya dilakukan pada sektor terpilih dari pada secara serentak di semua sektor ekonomi. Tidak ada satu pun negara terbelakang yang mempunyai modal dan sumber lain dalam kuantitas sedemikian besar untuk melakukan investasi secara serentak pada semua sektor. Oleh karena itu, investasi dilakukan pada beberapa sektor atau industri yang terpilih saja agar cepat berkembang dan hasil ekonominya dapat digunakan untuk pembangunan sektor lain. Dengan demikian perekonomian secara berangsur bergerak dari lintasan pertumbuhan tak berimbang menuju pertumbuhan yang seimbang. Ahli ekonomi seperti Singer, Kindleberger, Streeten, dan lain-lain,

mengungkapkan pendapat mereka yang mendukung doktrin pertumbuhan tidak seimbang tersebut yang sebenarnya merupakan kritik terhadap teori pertumbuhan yang berimbang. Meskipun demikian Rostow dan Hirschman-lah yang telah mengemukakan doktrin pertumbuhan tidak berimbang ini dengan cara yang sistematis.

2.1.4 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Ada sejumlah teori yang dapat menerangkan kenapa ada perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi antar daerah. Yang umum digunakan adalah teori basis ekonomi, teori lokasi, dan teori daya tarik industri (Tambunan, 2001: 289).

a. Teori Basis Ekonomi

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi di suatu daerah yang menggunakan Sumber Daya Produksi (SDP) lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku, dan outputnya diekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan pencapaian peluang kerja daerah tersebut.

b. Teori Lokasi

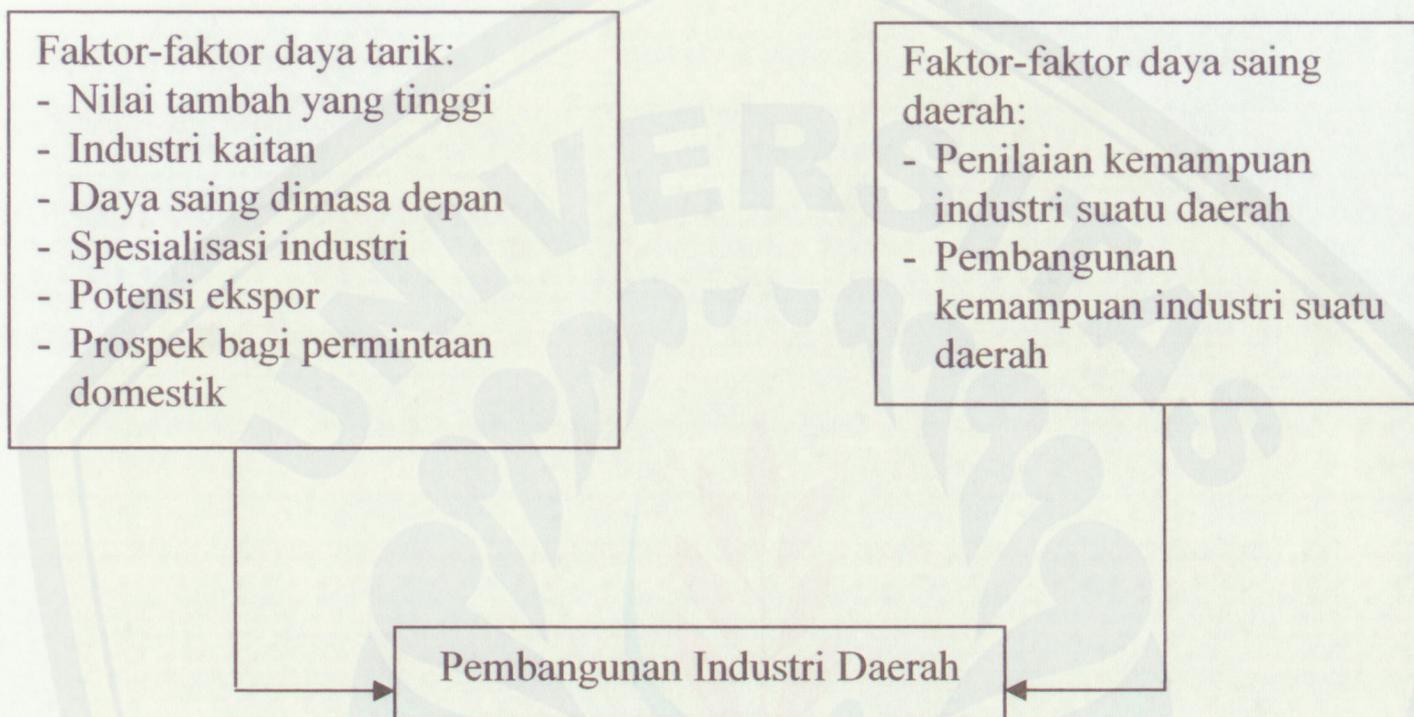
teori lokasi juga sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan industri di suatu daerah. Inti pemikiran ini didasarkan pada sifat rasional pengusaha atau perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin. Oleh karena itu, pengusaha akan memilih lokasi usaha yang memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasikan biaya usaha atau produksinya, yakni lokasi yang dekat dengan bahan baku dan pasar.

c. Teori Daya Tarik Industri

Dalam upaya pembangunan ekonomi daerah di Indonesia sering dipertanyakan jenis-jenis industri apa saja yang tepat untuk dikembangkan (diunggulkan). Ini adalah masalah membangun

portofolio industri suatu daerah. Untuk menjawab pertanyaan ini, mengikuti metodologi (kerangka pemikiran) Kotler dkk (1997). Ada sejumlah faktor penentu pembangunan industri di suatu daerah, yang terdiri atas faktor-faktor daya tarik industri dan faktor-faktor daya saing daerah.

Gambar 1 Faktor-faktor Penentu Dalam Pembangunan Industri Suatu Daerah



Sumber: Tambunan, 2001: 289

Faktor-faktor daya tarik antara lain sebagai berikut:

- a. Nilai tambah yang tinggi per pekerja (produktivitas).
Ini berarti industri tersebut memiliki sumbangan yang penting tidak hanya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga terhadap pembentukan PDRB.
- b. Industri-industri kaitan.
Ini berarti (seperti yang dibahas sebelumnya) perkembangan industri-industri tersebut akan meningkatkan total nilai tambah daerah atau mengurangi “kebocoran ekonomi”.
- c. Daya saing di masa depan.
Hal ini sangat menentukan prospek dari pengembangan industri yang bersangkutan.

d. Spesialisasi industri.

Sesuai dasar pemikiran teori-teori klasik mengenai perdagangan internasional, suatu daerah sebaiknya berspesialisasi pada industri-industri di mana daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif sehingga daerah tersebut akan menikmati *gain from trade*.

e. Potensi ekspor.

Dasar pemikiran sama dengan poin c dan d.

f. Prospek bagi pemerintahan daerah.

Dasar pemikirannya pada prinsipnya sama dengan poin a, yakni memberikan suatu kontribusi yang berarti bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui konsumsi lokal.

Faktor-faktor penyumbang daya tarik industri dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok (Kotler dkk, 1997), antara lain sebagai berikut:

a. Faktor-faktor pasar.

Faktor-faktor ini antara lain ukuran pasar, ukuran segmen kunci, laju pertumbuhan pasar, keragaman pasar, kepekaan terhadap harga dan faktor eksternal, siklus dan musim, dan kemampuan tawar-menawar.

b. Faktor-faktor persaingan.

Faktor-faktor ini antara lain tingkat pemusatan, substitusi disebabkan oleh progres teknologi, tingkat dan jenis integrasi, *entry rates* dan *exit rates*.

c. Faktor-faktor teknologi.

Faktor-faktor ini antara lain kompleksitas, diferensiasi, paten dan hak cipta, dan teknologi proses manufaktur yang diperlukan.

Selanjutnya berdasarkan dasar pemikiran dari Doz dan Prohalad (1987), keunggulan kompetitif yang ada atau potensial dari suatu daerah yang menentukan kemampuan suatu industri di daerah tersebut tergantung pada (1) daya saing faktor-faktornya yakni kekuatan relatif faktor-faktor produksinya yang mencakup sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan teknologinya (2) daya saing atau kekuatan relatif perusahaan-perusahaan di daerah tersebut.

Gambar 2 Penilaian Kemampuan Industri Suatu Daerah



Sumber: Tambunan, 2001: 290

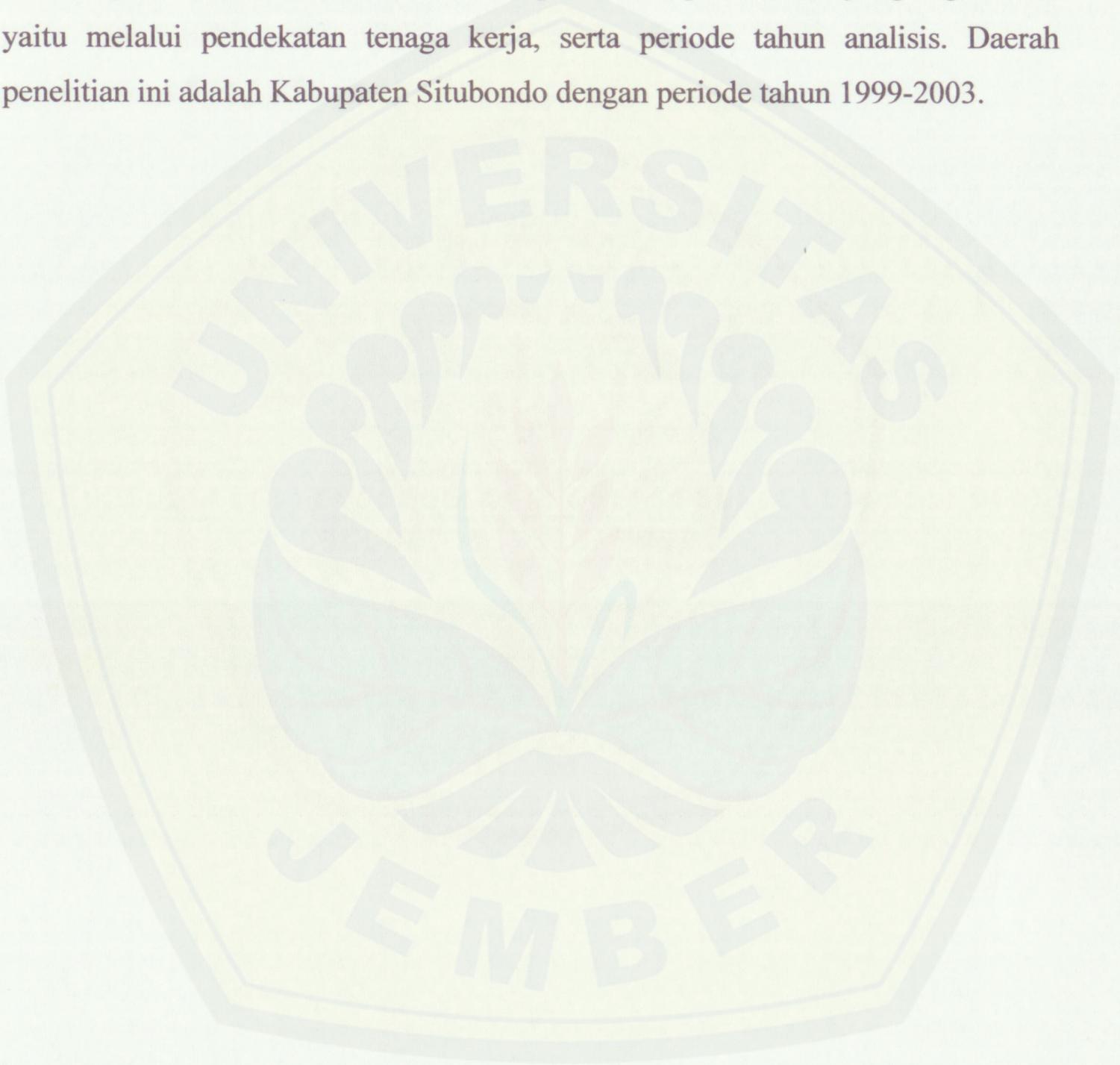
Menurut Doz dan Prohalad (gambar 2), ketika daya saing faktor-faktor suatu daerah tinggi dan perusahaan-perusahaan lokalnya sangat kompetitif, maka industri di daerah tersebut akan berkembang pesat. Apabila daya saing perusahaan-perusahaan yang ada di daerah tinggi, namun daya saing faktor-faktornya rendah, maka akan timbul tekanan bagi investasi ke luar daerah atau *outward invesment*, yakni investasi ke daerah-daerah lain yang memiliki daya saing faktor yang tinggi. Hal ini yang terjadi selama ini antara Pulau Jawa dan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Apabila daya saing perusahaan-perusahaan di suatu daerah rendah, sedangkan faktor-faktor yang dimiliki daerah tersebut tinggi, maka akan timbul investasi ke dalam atau *inward invesment* untuk industri-industri di mana perusahaan itu berada.

2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian Wahyu (2000) tentang "Identifikasi Sektor Ekonomi Potensial sebagai Pendekatan Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Mojokerto tahun 1996 - 1998". Untuk mengidentifikasi potensi sektoral di Kabupaten Mojokerto digunakan analisis *Location Quotion*, dengan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat empat sektor basis yaitu sektor pertanian dengan nilai *LQ* sebesar 1,16573, sektor pertambangan dan sektor penggalian dengan nilai *LQ* sebesar

1,6352, sektor listrik, gas dan air bersih dengan nilai LQ sebesar 1,16359 serta sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai LQ sebesar 1,03677.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dalam tujuan penelitian dan alat analisis yang digunakan, dengan penelitian sebelumnya, tetapi dalam penelitian ini ditambahkan alat analisis Pergeseran Koefisien *Archelus*. Perbedaannya terletak pada lokasi daerah atau daerah penelitian, pendekatan yang digunakan, yaitu melalui pendekatan tenaga kerja, serta periode tahun analisis. Daerah penelitian ini adalah Kabupaten Situbondo dengan periode tahun 1999-2003.





3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini bersifat analistis, yaitu penelitian ini menggunakan peralatan analisis dalam membangun pembahasannya dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif.

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu kinerja sektor yang berperan dalam peningkatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Situbondo. Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai basis analisis dan perkiraan kesimpulan.

3.1.3 Populasi dan sampel

Populasi penelitian adalah aktivitas sektor ekonomi di Kabupaten Situbondo, secara teoritis adalah aktivitas sektor ekonomi sejak Kabupaten Situbondo berdiri. Dalam hal ini yang menjadi kajian (sampel) adalah tahun 1999- 2003. Pada tahun tersebut kondisi ekonomi di Kabupaten Situbondo mulai normal kembali ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan 2 persen lebih.

3.1.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Situbondo, berdasarkan pertimbangan bahwa Kabupaten Situbondo merupakan daerah yang berpotensi terhadap perkembangan ekonomi wilayah Jawa Timur, dimana sumbangan PDRB Kabupaten Situbondo pada tahun 2003 adalah Rp 951,18 Milyar. Selain itu Kabupaten Situbondo tidak harus menggantungkan pada sektor basis dalam membangun ekonomi daerah.

3.2 Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat dari kantor BPS (Biro Pusat Statistik) Kabupaten Situbondo dan BAPPEKAB Situbondo, dengan

menggunakan data *time series* mulai tahun 1999 – 2003, selain itu juga melakukan studi pustaka.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Analisis *Location Quotion*

Untuk mengetahui sektor prioritas terpilih di Kabupaten Situbondo Tahun 1999 – 2003 yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut guna mendorong pengembangan pembangunan di Kabupaten Situbondo, digunakan analisis *LQ* (terhadap PDRB) Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang mendorong bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Situbondo (melalui data PDRB tahun 1999 - 2003) digunakan analisis *Location Quotion* (Yuwono, 1994: 47).

$$LQ = \frac{X_{in}/Y_n}{X_i/Y}$$

LQ = *Location Quotion* sektor i di Kabupaten Situbondo

X_{in} = *Vallue Added* sektor i Kabupaten Situbondo (Rp/th)

X_i = *Vallue Added* sektor i Provinsi Jawa Timur (Rp/th)

Y_n = PDRB Kabupaten Situbondo (Rp/th)

Y = PDRB Provinsi Jawa Timur (Rp/th)

Kriteria yang dipakai:

$LQ > 1$ berarti sektor i Kabupaten Situbondo merupakan sektor prioritas, karena unggul dalam persaingan dari sektor yang sama di daerah himpunan Provinsi Jawa Timur.

$LQ = 1$ berarti sektor i Kabupaten Situbondo mempunyai kekuatan daya saing yang sama dengan sektor yang sama di daerah himpunan Provinsi Jawa Timur.

$LQ < 1$ berarti sektor i Kabupaten Situbondo bukan termasuk sektor prioritas, karena kalah bersaing dengan sektor yang sama di daerah himpunan Provinsi Jawa Timur.

3.3.2 Analisis Koefisien Pergeseran *Archelus*

Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Situbondo yang mendampingi sektor basis di Kabupaten Situbondo digunakan pendekatan yang berdasarkan ketersediaan faktor tenaga kerja adalah Koefisien Pergeseran *Archelus* (Kotler, 1993) yang terdiri dari 3 (tiga) alat analisis yakni alat analisis Koefisien Laju Pertumbuhan (*National/ Regional Growth Component*), Koefisien Komponen Bauran Industri (*Industrial Mix Component*) dan Koefisien Kedudukan Kompetitif (*Competitive Effect Component*).

Koefisien Pergeseran *Archelus*

Koefisien Pergeseran *Archelus* diformulasikan sebagai berikut:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Dimana:

D_{ij} = besarnya nilai Koefisien Pergeseran *Archelus* yang menjelaskan besarnya perubahan proporsi penyerapan tenaga kerja di sektor perekonomian i di daerah j selama rentang waktu antara periode awal sampai akhir.

Koefisien pergeseran *Archelus* tersebut adalah sebuah modifikasi dari Koefisien Pergeseran Klasik yakni koefisien yang menjelaskan seberapa besar perubahan proporsi penyerapan tenaga kerja di sektor perekonomian i di daerah j antara awal sampai akhir periode pengamatan. Modifikasi tersebut dimaksudkan agar tujuan penelitian dapat diperluas dan memperluas pula hal-hal yang dapat direkomendasikan.

Koefisien Komponen Laju Pertumbuhan (*National/ Regional growth Component*).

Koefisien Komponen Laju Pertumbuhan memiliki formulasi :

$$N_{ij} = E_{ij} \cdot m$$

Konsekwensi logis dari pada besarnya nilai Koefisien Komponen Laju Pertumbuhan:

- a. Apabila Koefisien Laju Pertumbuhan tersebut bernilai positif (> 0) maka perkembangan proporsi penyerapan tenaga kerja di seluruh sektor perekonomian di daerah acuan (Provinsi Jawa Timur) akan memperkuat proporsi penyerapan tenaga kerja di sektor perekonomian i di daerah j (Kabupaten Situbondo), perkembangan sektor perekonomian i di tingkat nasional atau di tingkat daerah acuan akan menyebar ke daerah i melalui saluran-saluran dalam mekanisme transmisinya yang sesuai dengan efek yang mengakibatkannya, secara matematis bila m (angka pertumbuhan perekonomian nasional atau daerah acuan dimana daera j menjadi bagiannya) positif maka koefisien laju pertumbuhan akan positif.
- b. Apabila koefisien tersebut bernilai 0 (nol), maka perkembangan proporsi penyerapan tenaga kerja di seluruh sektor perekonomian di tingkat nasional atau daerah acuan tidak memiliki pengaruh yang menyebabkan sektor perekonomian i di daerah j semakin menguat atau melemah, secara matematis hal tersebut dapat terjadi apabila m besarnya sama dengan nol atau perekonomian nasional atau daerahacuan tidak tumbuh sama sekali.
- c. Apabila bernilai negatip (< 0), maka perkembangan penyerapan tenaga kerja diseluruh sektor perekonomian ditingkat nasional atau daerah acuan akan berpengaruh memperlemah proporsi penyerapan tenaga kerja di sektor perekonomian i di daerah j tersebut, secara matematis ini dapat terjadi bila m bernilai negatif atau perekonomian nasional atau daerah acuan mengalami kemunduran.

Koefisien Komponen Bauran Industri (*Industrial Mix Component*)

Koefisien Komponen Bauran Industri memiliki formulasi :

$$M_{ij} = E_{ij} \{ (E_{in}^* - E_{in}) / E_{in} - m \}.$$

Konsekwensi logis dari pada besarnya nilai Koefisien Bauran Industri:

- a. Apabila Koefisien Bauran Industri memiliki nilai positif (> 0), maka pengaruh-pengaruh yang terjadi di daerah j sendiri seperti yang disinggung pada bab teori terutama karena adanya proses aglomerasi industri akan memperkuat proporsi penyerapan tenaga kerja di sektor perekonomian i di daerah j , secara matematis dapat terjadi jika $(E_{in}^* - E_{in}) / E_{in} > m$.
- b. Apabila koefisien tersebut bernilai 0 (nol) proporsi penyerapan tenaga kerja disektor perekonomian i di daerah j akan sebanding atau tetap, secara matematis dapat terjadi jika $(E_{in}^* - E_{in}) / E_{in} = m$.
- c. Dan apabila koefisien tersebut bernilai negatif (< 0) berarti proporsi penyerapan tenaga kerja di industri i di daerah j sebagai akibat pengaruh-pengaruh yang telah disebutkan di atas menjadi menurun, secara matematis dapat terjadi jika $(E_{in}^* - E_{in}) / E_{in} < m$.

Koefisien Kedudukan kompetitif (*Competitive Effect Component*)

Koefisien Kedudukan kompetitif diformulasikan:

$$C_{ij} = E_{ij} (E_{ij}^* - E_{ij}) / E_{ij} - E_{ij} (E_{in}^* - E_{in}) / E_{in}$$

Konsekwensi logis dari besarnya nilai Koefisien Komponen Kedudukan Kompetitif:

- a. Apabila besarnya Koefisien Kedudukan Kompetitif tersebut lebih besar dari 0 (nol) atau positif. Maka kedudukan kompetitif sektor perekonomian i di daerah j akan semakin menguat atau perubahan proporsi tenaga kerja sebagai akibat kemampuan daerah j untuk menggeserkan kedudukan kompetitif sektor perekonomian i nya pada perekonomian daerah acuan semakin menguat, secara sistematis dapat terjadi jika

$$E_{ij} (E_{ij}^* - E_{ij}) / E_{ij} > E_{ij} (E_{in}^* - E_{in}) / E_{in}$$

- b. Apabila koefisien tersebut bernilai nol (0), maka kedudukan kompetitif sektor perekonomian i daerah j bersifat tetap, secara sistematis hal tersebut dapat terjadi jika $E_{ij} (E^*_{ij} - E_{ij})/E_{ij} = E_{ij} (E^*_{in} - E_{in})/E_{in}$.
- c. Dan apabila koefisien tersebut bernilai negatif (< 0), berarti kedudukan kompetitif sektor perekonomian i daerah j semakin melemah, secara matematis hal tersebut dapat terjadi jika
- $$E_{ij} (E^*_{ij} - E_{ij})/E_{ij} > E_{ij} (E^*_{in} - E_{in})/E_{in}$$

Keterangan notasi :

E_{ij} = persentase jumlah tenaga kerja di sektor perekonomian atau industri i di daerah j pada awal periode.

E^*_{in} = persentase jumlah tenaga kerja disektor perekonomian atau industri i nasional.

atau daerah yang lebih luas dimana daerah j menjadi bagiannya pada akhir periode.

E_{in} = prosentase jumlah tenaga kerja disektor perekonomian atau industri i nasional atau daerah yang lebih luas dimana daerah j menjadi bagiannya pada awal periode.

m = pertumbuhan ekonomi nasional atau wilayah yang lebih luas dimana daerah j menjadi bagiannya, secara matematis $m = (E^*_{in} - E_{in})/E_{in}$.

Faktor-faktor lain yang secara teoritis ikut berpengaruh menyumbang besarnya nilai koefisien diatas yakni Koefisien Komponen Laju Pertumbuhan, Koefisien Komponen Bauran Indusri dan Koefisien Komponen Kedudukan Kompetitif adalah :

- Suatu daerah mempunyai kemampuan distribusi yang lebih baik dan menguntungkan dari industri-industri yang dapat tumbuh lebih cepat.
- Adanya perubahan permintaan dan penawaran termasuk elastisitas pendapatan yang disebabkan oleh perubahan selera dan kemampuan teknologi.

- c. Industri-industri yang cepat berkembang tersebut memiliki akses pasar yang lebih baik seperti lebih dapat mengetahui siapa pembeli, dimana lokasi input (sumberdaya) bagi setiap aktivitas.

3.3.3 Asumsi-asumsi Yang Digunakan Dalam Analisis

Asumsi-asumsi dari alat-alat analisis di atas diturunkan dari teori pembagian kerja (teori klasik) untuk mencari spesialisasi dalam proses produksi antar daerah. Oleh sebab itu asumsi yang diberlakukan oleh teori pembagian kerja dipergunakan sebagai asumsi pada alat analisis dalam penelitian ini (Salvatore, 1997). Asumsi-asumsi antara lain:

1. Hubungan ekonomi yang ditunjukkan oleh karakteristik dari produk-produk yang dihasilkan oleh daerah-daerah dalam memperebutkan pasar adalah relatif bersaing.
2. Proporsi faktor dan keluberan faktor karunia yang tersedia di antara berbagai daerah relatif berbeda.
3. Produktivitas tenaga kerja relatif sama di antara berbagai daerah.
4. Anggapan-anggapan yang digunakan untuk menjelaskan manfaat perdagangan antar negara maupun antar daerah pada teori pembagian kerja, dianggap realistis semua dan diberlakukan pada penelitian ini, anggapan-anggapan tersebut antara lain:
 - a. Pasar komoditi yang diperdagangkan antar daerah berada pada kondisi pasar persaingan sempurna.
 - b. Komoditi-komoditi tersebut adalah komoditi yang memiliki baik *income* maupun *elasticity of demand* yang elastis.
 - c. *Oportunity cost* dianggap sama.
 - d. Ongkos transportasinya dianggap nol.
 - e. Tingkat teknologi dari individual *firm* dari daerah-daerah yang melakukan kerjasama perdagangan dianggap sama.
 - f. *Terms Of Trade* dianggap sama.

- g. Distribusi pendapatan per kapita dari daerah-daerah yang menyelenggarakan kerjasama perdagangan dianggap tidak berubah.

Asumsi-asumsi tersebut didasarkan pada rasionalitas bukan pada realitas suatu keadaan perekonomian.

3.3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran

Untuk menghindari salah pengertian dan untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka digunakan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Produk Domestik Regional Bruto yaitu jumlah seluruh nilai tambah produk yang ditimbulkan oleh sembilan sektor (lapangan usaha) yang melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Situbondo dan di daerah himpunan Provinsi Jawa Timur tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. Metode pendekatan yang digunakan untuk menghitung PDRB yaitu pendekatan produksi, dalam satuan Rp/th.
- b. *Value Added* adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh sembilan sektor ekonomi di Kabupaten Situbondo dan di daerah himpunan Provinsi Jawa Timur, dan kegiatan produksi selama tahun 1999 – 2003, dalam satuan Rp/th.
- c. Pertumbuhan Ekonomi adalah kemampuan Kabupaten Situbondo untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya yang terus meningkat dalam jangka panjang yang didasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan, dalam satuan Rp/th.
- d. Pendapatan Asli Daerah Sendiri adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayah Kabupaten Situbondo sendiri sesuai dengan Kep. Mendagri No.110 Tahun 1998, dalam satuan Rp/th.
- e. Sektor ekonomi prioritas adalah sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Situbondo yang mempunyai dampak pengganda yang paling besar, baik terhadap output, pendapatan dan tenaga kerja (selain sektor basis) dengan satuan Rp/th.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN



4.1 Gambaran Umum Wilayah

4.1.1 Keadaan Geografis

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan sebutan **Daerah Wisata Pantai Pasir Putih** yang letaknya berada di ujung Timur Pulau Jawa Bagian Utara dengan posisi di antara $7^{\circ} 35' - 7^{\circ} 44'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 30' - 114^{\circ} 42'$ Bujur Timur. Letak Kabupaten Situbondo di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.

Luas Kabupaten Situbondo adalah $1.638,50 \text{ Km}^2$ atau 163.850 Ha , bentuknya memanjang dari barat ke timur lebih kurang 140 Km . Pantai Utara umumnya berdataran rendah dan di sebelah selatan berdataran tinggi dengan rata-rata lebar wilayah lebih kurang 11 Km . Luas wilayah menurut Kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih $481,67 \text{ Km}^2$ disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu $26,41 \text{ Km}^2$. Dari 17 Kecamatan yang ada, diantaranya terdiri dari 14 Kecamatan yang memiliki pantai dan tiga Kecamatan yang tidak memiliki pantai, yaitu Kecamatan Sumbermalang, Kecamatan Panji, dan Kecamatan Jatibanteng.

Temperatur daerah ini lebih kurang antara $24,7^{\circ}\text{C} - 27,9^{\circ}\text{C}$ dengan rata-rata curah hujan antara $994 \text{ mm} - 1.503 \text{ mm}$ per tahunnya dan daerah ini tergolong kering. Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian $0 - 1.250 \text{ m}$ di atas permukaan air laut. Keadaan tanah menurut teksturnya, pada umumnya tergolong sedang 96,26 persen, tergolong halus 2,75 persen dan tergolong kasar 0,99 persen. Drainase tanah tergolong tidak tergenang 99,42 persen, kadang-kadang tergenang 0,05 persen dan selalu tergenang 0,53 persen. Jenis tanah daerah ini adalah alluvial, regosol, gleysol, renzine, grumosol, mediteran, latosol, serta andosol.

4.1.2 Keadaan Demografi

Penduduk dan kepadatannya merupakan faktor yang penting dalam pengembangan perekonomian di suatu daerah. Penduduk merupakan Sumber Daya Manusia (SDM). Dari hasil sensus penduduk terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo adalah 626.886 jiwa, yang terdiri dari 307.278 jiwa penduduk laki-laki dan 319.608 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Situbondo 379 jiwa/ Km².

Tabel 1 Jumlah Penduduk Di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio per Wilayah Kecamatan Tahun 2003 (jiwa)

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Sex Rasio*)
1	Sumbermalang	13.251	13.519	98,02
2	Jatibanteng	10.402	11.028	94,32
3	Banyuglugur	10.504	11.055	95,02
4	Besuki	28.458	29.511	96,46
5	Suboh	12.359	12.908	95,75
6	Mlandingan	11.088	11.465	96,71
7	Bungatan	11.524	12.281	93,84
8	Kendit	13.655	14.325	95,32
9	Panarukan	24.746	25.496	97,06
10	Situbondo	22.328	23.420	95,34
11	Mangaran	15.205	16.041	94,79
12	Panji	30.976	33.037	93,76
13	Kapongan	17.779	18.739	94,88
14	Arjasa	19.177	20.001	95,88
15	Jangkar	17.710	18.247	97,06
16	Asembagus	23.339	24.434	95,52
17	Banyuputih	24.777	24.101	102,80
Jumlah		307.278	319.608	96,14

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2003

Keterangan : *) Banyaknya laki-laki setiap 100 perempuan

Tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk yang terbesar di 17 Kecamatan, terdapat 5 (lima) urutan terpadat/ terbanyak masing-masing adalah Kecamatan Panji 64.013 jiwa, Besuki 57.969 jiwa, Panarukan 50.242 jiwa, dan Asembagus 48.878 jiwa. Bila dilihat dari urutan jumlah terkecil atau terjarang penduduknya, masing-masing adalah Kecamatan Banyuglugur 21.559 jiwa, Jatibanteng 21.430 jiwa, Mlandingan 22.553 jiwa, dan Kecamatan Suboh 25.267 jiwa.

Dari hasil sensus terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo akhir tahun 2003 mencapai 626.886 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 0,53 persen setiap tahunnya.

Tabel 2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo Menurut Jenis Kelamin Tahun 1999 – 2003

Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)	Persentase jenis kelamin		Perkembangan (persen)
		Laki-laki	Perempuan	
1999	581.080	48,83	51,17	-
2000	596.676	48,53	51,47	2,68
2001	599.855	48,10	51,90	0,53
2002	610.356	48,75	51,25	1,75
2003	626.886	49,02	50,98	2,71

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo, Desember 2003

Kenaikan dan penurunan jumlah penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, kematian, dan migrasi. Migrasi disebabkan oleh adanya perpindahan penduduk baik yang datang maupun yang keluar dari suatu wilayah. Bila administrasi atau registrasi kependudukan tersedia dengan baik, dalam mencatat kenaikan dan penurunan jumlah penduduk di setiap desa atau kelurahan, maka data kependudukan akan dapat terus terukur perkembangannya. Hal tersebut sangat mempengaruhi jumlah penduduk dari waktu ke waktu.

Dalam prakteknya, masih belum bisa optimal karena faktor tenaga, biaya dan prasarana yang belum memadai, hal ini dapat dibuktikan bila dibandingkan dengan hasil sensus penduduk, angkanya *under estimate* (jauh lebih rendah, di bawah angka sensus). Jumlah kelahiran yang dilaporkan tahun 2003 sebanyak

4.347 jiwa, sedangkan kematian sebanyak 2.599 jiwa, dan yang pindah sebanyak 2.154 jiwa serta yang datang sebanyak 14.275 jiwa.

Dari angka tersebut perpindahan netto sebesar 13.869 jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan yang disebabkan oleh migrasi penduduk yang disebabkan oleh tingkat kelahiran yang lebih tinggi dari pada tingkat kematian yang rendah dan jumlah penduduk yang masuk jauh lebih besar dibandingkan penduduk yang keluar (arus penduduk masuk), antara lain disebabkan oleh banyaknya penduduk yang melanjutkan sekolah (mondok) di pesantren-pesantren besar seperti di Kecamatan Banyuputih, Panji, Kapongan, serta pesantren lainnya.

4.1.3 Tinjauan Ekonomi Kabupaten Situbondo

Struktur ekonomi di suatu daerah atau wilayah ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan masing-masing sektor. Struktur ekonomi akan mengalami pergeseran-pergeseran sejalan dengan aktivitas pembangunan yang dilaksanakan, khususnya pembangunan di bidang ekonomi.

Kabupaten Situbondo sebagai daerah agraris yang sedang berkembang, pergeseran struktur akan bergerak dari sektor primer menuju ke sektor sekunder dan tersier. Hal ini disebabkan karena percepatan pembangunan sektor primer lebih lambat dari sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer mempunyai kendala pada potensi alam yang tidak dapat diperbaharui dengan cepat.

Struktur perekonomian Kabupaten Situbondo tidak seimbang atau berat sebelah karena sektor pertanian lebih banyak memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengembangan perekonomian di Kabupaten Situbondo dibandingkan dengan sektor yang lain, terbukti dengan luas lahan sektor pertanian yang mendominasi di Kabupaten Situbondo.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2002 mencapai hampir 14,58 milyar Rupiah,. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disumbang oleh retribusi daerah, pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang lain yang sah. Besarnya Dana Perimbangan dari pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk tahun 2003 sebesar 203,560 milyar Rupiah.

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau daerah tertentu selama satu tahun. Besarnya Produk Domestik Regional Bruto yang dihitung atas dasar harga konstan 2.072.864,16 Milyar Rupiah terjadi pada tahun 2001 dengan tingkat per kapita 3.017.489,16 Rupiah/ tahun.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2001 sebesar 2,69 persen, tahun 2002 sebesar 2,98 persen, pertumbuhan yang masih relatif rendah ini, disebabkan kondisi perekonomian yang belum normal kembali dan dirasakan masih tingginya tingkat harga yang terjadi. Hal tersebut berakibat produksi di beberapa sektor ekonomi mengalami stagnasi atau kenaikan produksi yang lambat disebabkan tingkat harga yang tinggi terhadap biaya produksi yang dirasakan oleh unit-unit ekonomi untuk skala menengah ke bawah terlihat pada tabel 3.

Tabel 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB Kabupaten Situbondo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1999 – 2003 (persen)

No	Sektor	1999	2000	2001	2002	2003
1	Pertanian	-	-1,18	-0,13	-0,91	2,56
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-0,03	0,01	0,08	0,11
3	Industri Pengolahan	-	-1,71	-0,05	-0,39	0,45
4	Listrik, Gas dan Air Minum	-	-0,02	0,07	0,02	0,11
5	Konstruksi	-	0,07	-0,06	0,35	0,33
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	-	0,18	-0,05	0,18	2,04
7	Pengangkutan dan Komunikasi	-	0,7	0,15	0,33	0,62
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	0,26	0,04	-0,09	0,28
9	Jasa-jasa	-	1,12	0,05	0,42	0,45

Sumber : lampiran 2 data diolah

Pertumbuhan ekonomi sebelum krisis terjadi, menunjukkan pertumbuhan yang positif rata-rata di atas 5 persen. Sedangkan tahun 1998 dampak krisis sangat dirasakan jatuh sampai negatif 5,03 persen. Tahun 1999 dan tahun 2000 pertumbuhan ekonomi mulai tumbuh positif, hanya masih relatif kecil berkisar 2 persen lebih, diantaranya disebabkan oleh kondisi perekonomian yang masih belum kembali normal, yang ditandai dengan masih tingginya tingkat harga dan tingginya kurs Dollar terhadap Rupiah.

Bila dilihat dari kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap besarnya PDRB, bahwa penyumbang terbesar secara berturut-turut adalah sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, jasa-jasa, angkutan dan telekomunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, konstruksi, listrik, gas dan air bersih, dan penggalian. Dari tahun ke tahun sektor pertanian sangat dominan dalam menyumbang besarnya PDRB, tahun 2001 sebesar 34,58 persen, tahun 2002 sebesar 37,42 persen. Penyumbang terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 36,62 persen. Sedangkan penyumbang terbesar ketiga dan keempat adalah sektor industri pengolahan dan jasa-jasa masing-masing 11,28 persen dan 8,32 persen terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Kabupaten Situbondo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1999 – 2003 (persen)

No	Sektor	1999	2000	2001	2002	2003
1	Pertanian	36,24	35,06	34,93	34,02	36,58
2	Pertambangan dan Penggalian	0,60	0,57	0,58	0,66	0,77
3	Industri Pengolahan	11,04	9,93	9,88	9,49	9,94
4	Listrik, Gas dan Air Minum	0,93	0,93	1,00	1,02	1,13
5	Konstruksi	3,33	3,33	3,27	3,62	3,95
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	27,99	28,17	28,12	28,30	30,34
7	Pengangkutan dan Komunikasi	7,28	7,28	7,43	7,76	8,38
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,73	5,99	6,03	5,94	6,22
9	Jasa-jasa	7,60	8,72	8,77	9,19	9,64
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : lampiran 2

Dominannya sektor pertanian sangatlah ditentukan oleh peranan dari subsektor tanaman bahan makanan, perkebunan, dan perikanan laut yang menjadi potensi daerah. Potensi lainnya yang sangat mendukung diantaranya adalah 154 buah pengusaha tambak dan *hatchery* di sepanjang pantai, 4 buah pabrik gula, 7 buah TPI, penghasil komoditi mangga andalan, dan Daerah Wisata Pantai Pasir Putih dan Taman Nasional Baluran yang cukup banyak mendatangkan wisatawan baik domestik maupun wisatawan asing.

Struktur ekonomi di Kabupaten Situbondo belum mengalami pergeseran struktur ekonomi yang berarti masih didominasi oleh sektor pertanian sebab

dipengaruhi oleh kondisi dan potensi ekonomi yang bersifat agraris. Sedangkan sektor-sektor lainnya diharapkan bisa mendukung sektor pertanian, yaitu peranan sektor industri, perdagangan, dan jasa-jasa dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

4.1.4 Pendapatan Per Kapita

Dari angka PDRB setiap tahunnya apabila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan diperoleh PDRB per kapita. Sedangkan pendapatan per kapita diperoleh dari angka PDRB setelah dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung netto dan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Konsep pendapatan per kapita sebenarnya harus dipisahkan antara pendapatan yang dihasilkan oleh wilayah itu sendiri dengan pendapatan yang mengalir keluar wilayah, artinya pendapatan yang dihasilkan oleh unit-unit produksi milik wilayah setempat dikurangi dengan pendapatan produksi milik produk luar yang unit produksinya berada di wilayah tersebut, sehingga benar-benar mencerminkan pendapatan per kapita riil. Hanya saja pengumpulan datanya belum tersedia dan sulit diperoleh.

Pendapatan per kapita di Kabupaten Situbondo tahun 2002 adalah sebesar 3.371.769 Rupiah per tahun. Meningkat sebesar 11,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Disamping sangat perlu diupayakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di semua sektor ekonomi, penyumbang PDRB terbesar adalah dari sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa diharapkan terus tumbuh positif, sebab sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, bukanlah berarti mengabaikan sektor ekonomi yang lain, akan tetapi peranannya lebih diprioritaskan, sebab keempat sektor tersebut kontribusinya besar.

4.1.5 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan antara lain sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk usia kerja dan tersedianya lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja. Bertambahnya penduduk usia kerja jika tidak diimbangi dengan tersedianya

lapangan pekerjaan, maka akan menimbulkan masalah pengangguran, untuk itu kesempatan kerja yang disebabkan oleh tersedianya lapangan pekerjaan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan sosial ekonomi.

Penduduk usia 10 tahun ke atas digolongkan sebagai angkatan kerja jika mereka bekerja atau mencari kerja, dan bukan angkatan kerja jika mereka bersekolah dan tidak mencari kerja. Keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Situbondo dan wilayah Jawa Timur berdasarkan sektor perekonomian dapat dilihat dari tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5 Proporsi Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Berdasarkan Sektor Perekonomian Tahun 1999 – 2003 (Persen)

No	Sektor	1999	2000	2001	2002	2003
1	Pertanian	63,10	60,10	57,80	64,42	53,53
2	Pertambangan dan Penggalian	0,08	-	0,09	0,28	0,30
3	Industri Pengolahan	9,67	5,84	7,32	6,18	8,92
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,29	0,06	0,14	0,17	0,28
5	Konstruksi	1,68	3,41	3,60	3,15	3,13
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,89	15,87	16,39	15,10	17,93
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5,13	5,77	4,88	4,45	4,82
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,53	0,45	0,66	0,44	1,00
9	Jasa-jasa	0,61	8,51	9,10	5,81	10,10
Jumlah		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2003

Tabel 6 Proporsi Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Sektor Perekonomian Tahun 1999 – 2003 (Persen)

No	Sektor	1999	2000	2001	2002	2003
1	Pertanian	46,18	45,02	48,18	47,18	49,06
2	Pertambangan dan Penggalian	0,59	0,48	0,57	0,85	0,59
3	Industri Pengolahan	12,51	13,46	12,62	12,84	12,12
4	Listrik, Gas dan Air Minum	0,18	0,20	0,13	0,16	0,21
5	Konstruksi	3,62	4,07	3,95	4,07	2,75
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,80	20,21	18,27	18,16	17,90
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4,53	5,29	4,94	4,86	5,01
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,66	1,06	1,10	1,05	0,81
9	Jasa-jasa	12,70	10,21	10,12	10,75	10,37
Jumlah		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Jawa Timur Tahun 2003

4.1.6 Potensi Sektoral

Untuk mengetahui potensi ekonomi Kabupaten Situbondo dapat dilihat melalui potensi sektoral yang ada, diantaranya:

1. Sektor pertanian

Sektor pertanian terdiri atas beberapa subsektor, yaitu:

- a. Subsektor Tanaman Pangan, yaitu meliputi: padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, buah-buahan utamanya mangga, dan sayur-sayuran. Produksi tanaman pangan ditahun 2003 dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk beberapa komoditi mengalami penurunan. Komoditi yang mengalami kenaikan hanyalah komoditi padi sawah dan padi gogo/tegal. Komoditi yang mengalami penurunan produksi diantaranya meliputi jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau dan kedelai. Bila dilihat dari luas panen masing-masing komoditi, diantaranya yang mengalami kenaikan adalah padi, ubi kayu, kacang tanah dan kedelai, masing-masing mengalami kenaikan luas panen sebesar 19,97 persen, 16,86 persen. Sedangkan, komoditi yang mengalami penurunan luas panen adalah komoditi jagung dan kacang hijau, masing-masing turun sebesar 2,01 persen dan 57,22 persen. Produksi bawang merah mengalami penurunan dari 9.962 kw menjadi 8.800 kw atau turun 13,20 persen. Kacang panjang produksinya juga turun dari 265 kw menjadi 170 kw atau turun 55,88 persen, sedangkan cabe naik sampai lima kali lipat lebih, tomat turun sampai tiga kali lipatnya, sedangkan terong naik sebesar 8,06 persen.

Tabel 7 Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi dan Palawija Tahun 2003

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (kw)	Rata-rata (kw/ Ha)
1	Padi Sawah	34.999	1.857.954,49	53,09
2	Padi Gogo Tegal	205	7.642,40	37,28
3	Jagung	43.440	1.604.451,05	36,93
4	Ubi Kayu	848	136.188,80	160,60
5	Kacang Tanah	761	11.574,26	15,21
6	Kacang Hijau	1.419	12.961,44	9,13
7	Kacang Kedelai	610	9.246,56	15,16

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2003

Tabel 8 Luas Penanaman Baru dan Produksi Sayur-sayuran Menurut Jenisnya Tahun 2002 – 2003

No	Jenis Sayuran	Tanaman Baru (Ha)	Produksi (Kw)				
			1999	2000	2001	2002	2003
1	Bawang Merah	113	106.322	9916	-	9.962	8.800
2	Bawang Daun	14	-	-	-	-	1.195
3	Kacang Panjang	8	215	276	179	265	170
4	Cabe	110	6.511	13.465	2.115	1.149	5.818
5	Tomat	3	18.814	1.434	411	776	240
6	Terong	1	773	299	143	310	335
7	Ketimun	4	136	6.681	62	50	170
8	Semangka	67	15.478	8.849	10.037	265	13.337
9	Melon	2	-	-	-	-	510

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2003

b. Subsektor Tanaman Perkebunan yaitu meliputi: kelapa, kopi, tebu, tembakau, kapuk, asam jawa, siwalan, cengkeh, jambu mente, pinang, dan biji jarak. Produksi kelapa pada tanaman perkebunan rakyat pada tahun 2003 mengalami kenaikan 4.286 ton menjadi 4.661 ton atau naik sebesar 8,75 persen. Kopi/ ose kering produksinya stabil. Sedangkan produksi tanaman tebu mengalami kenaikan dari 33.502 ton menjadi 37.391 ton atau naik sebesar 11,61 persen. Sedangkan produksi tanaman perkebunan lainnya seperti cengkeh, jambu mente, kapuk randu, siwalan, pinang, asam jawa, nilam, mlinjo dan jarak perubahannya cukup bervariasi dan tidak terlalu besar kontribusinya terhadap nilai tambah subsektor perkebunan. Dari subsektor perkebunan yang dikelola melalui PTP Nusantara XI dan perusahaan daerah diantaranya produksi tebu mengalami penurunan dari 7.302 ton menjadi 6.872 ton atau turun 6,26 persen. Produksi kopi dibandingkan tahun 2002 mengalami kenaikan dari 322 ton menjadi 338 ton atau naik 4,97 persen, sedangkan tanaman kapuk randu produksinya naik dari 75 ton menjadi 78 ton atau naik 4 persen.

c. Subsektor Peternakan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang bervariasi dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat kebutuhan

konsumsi masyarakat. Populasi ternak tahun 2003 menunjukkan perkembangan yang positif, antara lain dapat ditunjukkan oleh kenaikan populasi sapi 0,02 persen, populasi sapi perah naik 8,06 persen, populasi kambing naik 1 persen, populasi domba naik 0,99 persen, ayam kampung/buras naik 0,95 persen, ayam ras turun 11,10 persen dan itik naik 1,34 persen. Bila dilihat dari produksinya, produk daging ditahun 2003 mengalami penurunan 12,06 persen, produksi telur turun sampai 6,69 persen, produksi susu naik 7,71 persen, kulit sapi turun 5,53 persen, kulit kambing naik 18,32 persen, dan kulit domba turun 3,76 persen. Dari data RPH (Rumah Potong Hewan) diperoleh jumlah ternak yang dipotong, diantaranya sapi turun 6,51 persen, kambing naik 1,02 persen dan domba turun 6,06 persen, ayam kampung dan ayam ras naik masing-masing 3,08 persen dan 7 persen.

Tabel 9 Populasi Ternak dan Unggas Menurut Jenisnya (Ekor) Tahun 1999 - 2003

No	Jenis Ternak/ Unggas	1999	2000	2001	2002	2003
1	Sapi Potong	138.527	139.788	130.851	134.772	134.799
2	Sapi Perah	92	96	62	62	67
3	Kerbau	1.365	1.068	710	732	732
4	Kuda	1.313	1.198	1.103	1.129	1.129
5	Kambing	43.387	43.812	44.691	46.995	47.465
6	Domba	69.990	71.542	72.882	76.527	77.292
7	Babi	193	-	-	-	-
8	Ayam Buras	592.339	599.447	672.826	562.570	564.321
9	Ayam Ras	41.790	49.100	41.550	41.000	24.900
10	Itik	36.996	37.340	42.197	44.473	45.069

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2003

d. Subsektor perikanan meliputi perikanan budi daya tambak, kolam dan penangkapan di perairan umum mengalami penurunan dari 2.847,71 ton menjadi 322,9 ton dengan nilai produksi pada tahun 2003 hanya mencapai 7,48 milyar Rupiah. Beberapa hasil produksi diantaranya jenis ikan lele,

mujair, udang windu, putih, banding, gurami, tombro, nila gift, tawes, dan lainnya. Sedangkan untuk produksi ikan olahan, diantaranya ikan pindang mengalami penurunan dari 6.300 ton menjadi 5.133,5 ton atau turun 22,32 persen dan ikan kering juga mengalami penurunan dari 556,3 menjadi 105 ton.

Tabel 10 Perkembangan Produksi Ikan Olahan per Triwulan Tahun 2001 – 2003 (Ton)

No	Triwulan/ Tahun	Ikan Pindang	Ikan Kering	Jumlah	
1	I	2001	1.634,400	434,100	2.068,500
		2002	335,000	39,700	374,700
		2003	345,600	56,000	401,600
2	II	2001	1.915,100	184,500	2.099,600
		2002	723,500	50,800	774,300
		2003	305,700	21,100	326,800
3	III	2001	2.254,200	368,000	2.622,200
		2002	685,200	377,400	1.062,600
		2003	308,900	10,600	319,500
4	IV	2001	335,000	39,700	374,700
		2002	4.556,300	88,400	4.644,700
		2003	4.173,300	17,300	4.190,600
Jumlah		2001	6.138,700	1.026,300	7.165,000
		2002	6.300,000	556,300	6.856,300
		2003	5.133,500	105,000	5.238,500
Persentase		2001	85,68	14,32	100,000
		2002	91,89	8,11	100,000
		2003	98,00	2,00	100,000
Rata-rata Triwulan I			771,667	176,600	948,267
Rata-rata Triwulan II			981,433	85,467	1.066,900
Rata-rata Triwulan III			1.082,767	252,000	1.334,767
Rata-rata Triwulan IV			3.021,533	48,467	3.070,000

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2003

- e. Subsektor kehutanan diantaranya berupa kayu jati dan kayu rimba, kayu bakar, lak cabang, dan getah pinus. Produksi kayu jati gelondongan, pada tahun 2003 sebesar 4.981.456 m³ dengan nilai produksi 11,10 milyar, kayu gelondongan rimba dengan jumlah produksi 1.010 m³ dengan nilai produksi 252,5 juta. Sedangkan produksi kayu bakar baik jati dan rimba dengan nilai produksi 8,73 juta. Produksi hasil hutan lainnya yang cukup menunjang berupa lak cabang dengan produksi 908 ton dengan nilai

182,52 juta Rupiah, sedangkan produksi lainnya seperti getah pinus, kedawung, dan hasil hutan lainnya juga meningkat dari tahun ke tahun hanya saja nilainya masih relatif kecil.

Tabel 11 Produksi dan Nilai Komoditi Hasil Hutan Menurut Jenisnya Tahun 2003

No	Jenis Komoditi	Satuan	Produksi	Nilai (000 Rp)
1	Kayu Glondongan			
	- Jati	M3	4.981.456	11.097.653
	- Rimba	M3	1.010	252.500
2	Kayu Bakar			
	- Jati	Sm	129	6.255
	- Rimba	Sm	165	2.475
3	Lak Cabang	Kg	908.000	182.517
4	Kedawung	Kg	832	3.744
5	Getah Pinus	Ton	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2003

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian, meliputi semua jenis barang galian yang berbentuk batu-batuan, seperti batu gunung, batu kali, batu koral, batu kerikil, pasir dan tanah liat, dolomite, batu kapur, dan lain-lain.

Cakupan sektor penggalian yang ada di Kabupaten Situbondo adalah komoditi tambang galian golongan C, diantaranya komoditi pasir, tanah liat, batu, batu kapur dan trass. Pada tahun 1999 sektor penggalian menyumbang terhadap besarnya PDRB sebesar 0,60 persen, pada tahun 2000 mampu menyumbang sebesar 0,57 persen, tahun 2001 mampu menyumbang sebesar 0,58 persen, pada tahun 2002 sektor penggalian mampu menyumbang terhadap besarnya PDRB sebesar 0,62 persen dan pada tahun 2003 naik menjadi 0,68 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor penggalian menunjukkan perkembangan yang stabil dari tahun ke tahun, yang disebabkan oleh keadaan SDA yang terus-menerus diusahakan secara konvensional dari tahun ke tahun. Peranan sektor ini terhadap PDRB masih kecil dibandingkan dengan sektor lain, sebab belum disertai oleh peranan pertambangan dan belum disertai pula oleh investasi yang besar yang ada di Kabupaten Situbondo. Selain itu, untuk sektor ini hanya penggalian saja, sedangkan pertambangan masih belum ada.

3. Sektor Industri Pengolahan

Sektor ini mencakup industri besar dan sedang yaitu badan usaha dengan jumlah tenaga kerja 20 atau lebih, industri kecil dan kerajinan rumah tangga di berbagai kegiatan industri. Keberadaan industri di Kabupaten Situbondo baik Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga (IKKR) maupun Industri Besar/ Sedang (IB/S) perlu terus dikembangkan. Pada tahun 2003 jumlah keseluruhan dari industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang ada sebanyak 7.546 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 25.277, sedangkan jumlah industri sedang/ besar sebanyak 91 perusahaan, yaitu seperti pabrik gula (PG) yang jumlahnya ada lima buah, pabrik tapioka, mebel, pemindangan, selep/ penggilingan, pengolahan kapas, industri mie/ sohun, industri kecap, industri tahu dan lainnya. Jumlah tersebut turun 8,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya karena dampak dari krisis ekonomi. Jenis industri kecil yang ada diantaranya industri makanan/ minuman, perhiasan, kemasan, anyaman, genteng, bata, pandai besi, dan lainnya, terbanyak berasal dari industri makanan/ minuman, genteng, bata, anyaman. Walaupun sektor industri terlihat menurun, akan tetapi jumlah tenaga kerja yang terserap cukup banyak. Haal ini berarti menunjukkan perkembangan dan perlu terus dikembangkan, mengingat sumber daya alam yang ada cukup memadai seperti kerajinan dari kerang, kayu jati/ *surving* dan industri lainnya. Selama lima tahun terakhir sektor industri pengolahan rata-rata mampu memberikan sumbangan terhadap PDRB rata-rata hampir 11 persen pertahun. Pada tahun 2002 mampu memberikan kontribusi sebesar 11,28 persen, sedangkan tahun 2003 memberikan kontribusi sebesar 9,38 persen. Kenaikan dan penurunan sektor industri pengolahan ini sangat bergantung pada naik turunnya produksi pada subsektor industri makanan, utamanya industri gula (PG) yang dikelola oleh PTP Nusantara XI (PT. Persero), yang sangat bergantung pada tersedianya tanaman tebu. Jika dilihat lebih jauh, bahwa sumbangan sektor industri pengolahan secara berturut-turut ditentukan oleh sumbangan dari subsektor industri makanan, minuman dan tembakau

sebesar 8,52 persen, industri tekstil, industri barang kulit dan alas kaki 0,06 persen, industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya 0,11 persen, industri kertas dan barang cetakan 0,09 persen, industri pupuk, kimia dan barang lain dari karet 0,04 persen, industri barang galian non logam 0,45 persen dan industri barang lainnya sebesar 0,11 persen. Bila dibandingkan antara industri besar/ sedang dan industri kecil kerajinan rumah tangga dalam menghasilkan nilai output dan nilai tambah, nilai industri besar dan sedang jauh lebih besar dibandingkan dengan subsektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga, karena perusahaan industri dengan skala besar dan sedang pada umumnya mempunyai investasi, teknologi yang besar, dan pekerja yang terampil, sehingga memungkinkan untuk memproduksi barang dalam skala besar serta dapat memasarkan barang yang dihasilkan sehingga dapat diterima oleh konsumen dengan baik. Namun, di dalam penyerapan tenaga kerja, subsektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga peranannya cukup besar karena industrinya tersebar di beberapa tempat.

Tabel 12 Perkembangan Jumlah Industri Menurut Jenisnya dan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 1999 – 2003

No	Jenis Industri	Satuan	1999	2000	2001	2002	2003
1	INDUSTRI						
	Kerajinan/ Kecil	Unit	7.351	7.448	7.448	7.448	7.604
	Besar/ Sedang	Unit	74	76	93	93	92
2	TENAGA KERJA						
	Kerajinan/ Kecil	Orang	24.555	24.708	24.806	24.806	26.288
	Besar/ Sedang	Orang	5.113	5.883	6.074	6.074	5.985

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2003

4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Penggunaan penerangan melalui listrik yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) semakin dirasakan dari banyaknya pelanggan PLN dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah pelanggan yang ada pada tahun 2003 sebanyak 96.943 pelanggan. Produksi listrik yang dibangkitkan sebanyak 149.136.816 Kwh, dan yang didistribusikan sebanyak 132.802.400 Kwh. Dari perkembangan listrik yang masuk desa atau pemakaian listrik yang

bisa dinikmati oleh masyarakat pedesaan mencapai 98,53 persen. Penggunaan air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya bagi kesehatan dan berbagai keperluan sehari-hari. Hal ini juga ditunjukkan oleh meningkatnya pelanggan PDAM dan produksi air bersih yang dibangkitkan. Jumlah pelanggan pada tahun 2002 sebanyak 18.234 sedangkan ditahun 2003 meningkat menjadi 19.068 naik sebesar 4,57 persen. Demikian pula produksi air bersih yang dihasilkan sebesar 6.094.444 M³ untuk tahun 2002 dan 6.439.981 M³ untuk tahun 2003 atau meningkat 5,67 persen. Sedangkan tarif pemakaian setiap M³ sebesar Rp 450,-.

5. Sektor Konstruksi

Sektor konstruksi bila diamati dari angka PDRB dari tahun ke tahun sumbangannya terhadap besarnya PDRB menunjukkan kenaikan yang tidak terlalu jauh, yang berarti kenaikan nilai bangunan fisik yang diselesaikan dari tahun ke tahun masih kurang dari 4 persen. Bila selama lima tahun terakhir rata-rata kontribusinya terhadap PDRB sebesar 3,3 persen per tahun. Pada tahun 2002 menyumbang sebesar 3,73 persen, sedangkan pada tahun 2003 menyumbang sebesar 3,95 persen. Pembangunan di sektor bangunan atau konstruksi, dari tahun ke tahun ditandai oleh meningkatnya jumlah fisik bangunan, baik yang dibangun oleh masyarakat sendiri, pemerintah maupun swasta. Kegiatan pembangunan fisik konstruksinya diantaranya adalah berupa gedung, jembatan, dam, irigasi, jaringan listrik, jaringan telepon, air minum dan konstruksi lainnya.

6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran selama lima tahun terakhir rata-rata mencapai 32 persen per tahun dalam sumbangannya terhadap PDRB. Pada tahun 2002 mampu menyumbang sebesar 29,14 persen, sedangkan pada tahun 2003 mampu menyumbang sebesar 30,34 persen. Peranan sektor ini

menduduki peranan kedua setelah sektor pertanian dalam kontribusi sumbangan terhadap PDRB. Hal ini berarti sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor ekonomi yang penting sumbangannya dalam perekonomian Kabupten Situbondo. Lebih-lebih dalam menyikapi dampak krisis dimana kegiatan perdagangan dalam lingkungan masyarakat baik perdagangan besar maupun eceran lebih cepat berkembang, khususnya di tempat-tempat strategis, pasar pekotaan, daerah wisata (seperti di Pasir Putih) sangat mendukung berkembangnya sektor ini. Bila diamati angka PDRB dari masing-masing subsektor di tahun 2003 melalui harga konstan, kontribusi terbesar adalah dari subsektor perdagangan yaitu 25,97 persen, sedangkan untuk subsektor hotel sebesar 0,44 persen dan subsektor restoran sebesar 3,93 persen. Walaupun subsektor hotel dan restoran kecil, yaitu kurang dari 5 persen, tetapi perkembangannya di Kabupaten Situbondo perlu mendapatkan perhatian karena merupakan potensi daerah yang perlu dikembangkan, utamanya jumlah hotel dan restoran yang ada di tempat wisata Pantai Pasir Putih dan pusat kota, cukup berperan terhadap sektor-sektor lainnya dalam menunjang sektor-sektor lain dan berkaitan, seperti berkembangnya industri kerajinan, jasa-jasa dan sektor lainnya. Dalam konsep statistik, yang dimaksud subsektor restoran termasuk juga pengusaha kecil seperti warung makan, depot, kedai, dan rumah makan lainnya yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Tabel 13 Banyaknya KUD Menurut Unit Keegiatannya Tahun 1999 –2003

No	Unit Kegiatan	1999	2000	2001	2002	2003
1	Pengadaan Pupuk, Saprotan & Saprodi	9	9	20	20	20
2	Pengadaan Pangan	17	12	12	6	6
3	Simpan Pinjam	4	5	7	7	7
4	Pemasaran	18	18	18	18	18
5	Rice Milling Unit	19	19	19	19	19
6	Perikanan dan Peternakan	6	6	15	15	15
7	Perdagangan	14	13	14	14	14
8	Angkutan	1	1	1	1	1
9	Kredit Usaha Tani	42	9	4	-	-
10	Pelistrikan	16	18	8	18	18
11	Pegadaian	-	-	-	-	2

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2003

Tabel 14 Perkembangan Rata-rata Tarif Hotel Menurut Fasilitas Kamar Tahun 1999 – 2003

No	Tahun	Kamar Standard		Kamar Suite
		Tarif Minimum	Tarif Maksimum	
1	1999	7.000	61.824	165.000
2	2000	7.500	115.000	250.000
3	2001	15.000	200.000	250.000
4	2002	15.000	200.000	250.000
5	2003	43.850	89.150	152.000

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2003

7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor ini terbagi atas subsektor pengangkutan dan komunikasi. Selama lima tahun terakhir, sektor ini mampu menyumbang rata-rata 8 persen per tahun. Pada tahun 2003 mampu memberikan kontribusi sebesar 8,38 persen. Peranan dari sektor ini dalam menyumbang besarnya PDRB terbesar ditentukan oleh peranan dari subsektor angkutan jalan raya dan angkutan laut, dimana terdapat dua kantor pelabuhan, yaitu pelabuhan Kalbut yang meliputi satker Besuki, Kalbut, Jangkar, Pasir Putih dan Mimbo serta pelabuhan Panarukan. Peranan dari sektor ini disumbang oleh subsektor pengangkutan sebesar 8,08 persen dan subsektor komunikasi sebesar 0,29 persen. Sumbangan dari subsektor angkutan meliputi, angkutan rel, angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan penyeberangan dan komunikasi meliputi kegiatan pos, telekomunikasi, dan jasa penunjang komunikasi, seperti wartel, kios pos, internet dan lainnya.

Tabel 15 Produksi dan Sarana Telekomunikasi Tahun 2003

No	Produksi	Triwulan			
		I	II	III	IV
1	Jumlah Pulsa Dipakai	112.017.341	126.889.585	125.471.993	131.364.908
2	Jumlah Pelanggan				
	- Telepon	14.218	14.835	14.888	15.093
	- Internet	720	692	704	713
3	Lain-lain				
	-Telepon Umum	314	283	275	265
	- Warnet	13	15	14	13
	- Wartel	707	719	720	722

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2003

8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dari tahun ke tahun terus menunjukkan angka PDRB yang meningkat, namun dari besarnya persentase kontribusi terhadap PDRB untuk tahun 2003 sebesar 6,22 persen, sedangkan tahun sebelumnya yaitu 6,12 persen. Kenaikan yang tipis ini antara lain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang belum stabil, dimana kemampuan menabung dari masyarakat juga menurun karena tingkat harga-harga barang masih tinggi, sehingga masyarakat lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dari pada ditabung. Walaupun sektor keuangan mengalami penurunan, akan tetapi peranan perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam menunjang perekonomian di daerah. Hal ini dapat ditunjukkan oleh semakin pentingnya peranan perbankan sampai level mikro/ desa untuk menggerakkan perekonomian daerah. Peranan dari perbankan dan lembaga keuangan non bank ini hanya memberikan kontribusi sebesar 0,16 persen akan tetapi sangat menopang sektor yang lain seperti perdagangan, pertanian, industri dan jasa-jasa. Dari sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ini berturut-turut

disumbang oleh subsektor bank 0,76 persen, subsektor lembaga keuangan bukan bank sebesar 0,25 persen, subsektor sewa bangunan 4,77 persen dan jasa perusahaan 0,43 persen.

Tabel 16 Banyaknya Pemilik SIUP Menurut Golongan Usaha

No	Tahun	Golongan Usaha			Jumlah
		Pengusaha Kecil	Pengusaha Menengah	Pengusaha Besar	
1	1999	123	8	-	131
2	2000	182	11	-	193
3	2001	206	14	-	220
4	2002	189	20	2	211
5	2003	343	25	6	374
	Jumlah	1043	78	8	1129

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2003

9. Sektor Jasa-jasa

Sektor jasa-jasa meliputi dua subsektor, yaitu subsektor pemerintahan umum dan swasta, sedangkan subsektor swasta itu sendiri meliputi jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan serta jasa perorangan dan rumah tangga. Pada tahun 2003 kontribusi dari sektor jasa-jasa ini adalah sebesar 9,64 persen, yakni diperoleh dari subsektor pemerintahan umum 7,19 persen dan subsektor swasta sebesar 2,45 persen, sedangkan subsektor swasta disumbang oleh subsektor jasa sosial kemasyarakatan 1,23 persen, subsektor jasa hiburan dan kebudayaan 0,06 persen dan subsektor jasa perorangan dan rumah tangga 1,06 persen. Peranan sektor jasa-jasa ini terhadap PDRB menduduki peringkat keempat setelah sektor industri pengolahan, hal ini berarti bahwa sektor jasa-jasa cukup menduduki peranan yang patut diperhitungkan, sebab yang tercakup dalam sektor jasa-jasa banyak sekali ragam kegiatannya, seperti jasa hiburan dan kebudayaan, jasa sosial kemasyarakatan, jasa perorangan seperti jasa perbengkelan, jasa reparasi, salon dan sebagainya. Lebih-lebih

kondisi krisis yang belum menunjukkan perubahan yang cepat bagi kesejahteraan masyarakat, sektor jasa merupakan alternatif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, utamanya jasa perorangan.

Tabel 17 Peranan Sektor Jasa-jasa Tahun 2000 – 2003 (persen)

No	Jenis Jasa	2000	2001	2002	2003
1	Pemerintahan Umum	4,55	6,85	7,02	7,19
2	Hiburan & Kebudayaan	0,06	0,06	0,06	0,06
3	Sosial & Kemasyarakatan	1,05	1,08	1,01	1,23
4	Perorangan & RT	1,06	1,08	1,10	1,06

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2003

4.2 Analisis Data

4.2.1 Sektor Prioritas

Sektor prioritas ialah salah satu atau beberapa sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan dengan sektor lainnya dalam suatu daerah himpunan. Sektor prioritas atau kelompok sektor prioritas di suatu daerah dapat diketahui dengan menggunakan analisis *Location Quotion (LQ)*, yaitu suatu analisis yang membandingkan kontribusi sektor ekonomi tertentu terhadap total PDRB pada lingkup nasional, dalam hal ini daerah himpunan di tingkat provinsi. Jika hasil perhitungan *LQ* lebih kecil dari satu ($LQ < 1$) berarti sektor tersebut bukan sektor prioritas karena kalah bersaing dengan sektor yang sama di daerah himpunan.

Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Situbondo yang mendampingi sektor basis digunakan pendekatan yang berdasarkan ketersediaan tenaga kerja adalah Koefisien Pergesaran *Archelus*, yang terdiri dari 3 (tiga) alat analisis yakni Koefisien Komponen laju pertumbuhan (*National/ Regional Growth Component*), Koefisien Komponen Buran Industri (*Industrial Mix Component*), dan Koefisien Komponen Kedudukan Kompetitif (*Competitive Effect Component*).

a. Analisis *Location Quotion*

Dari perhitungan *LQ* (Lampiran 5), diketahui bahwa Kabupaten Situbondo pada tahun 1999 – 2003 secara sektoral memiliki beberapa sektor prioritas yang harus mendapat perhatian lebih, seperti tertera pada tabel 7.

Tabel 18 Nilai *LQ* Sektor Prioritas di Kabupaten Situbondo Tahun 1999 – 2003

No	Sektor	1999	2000	2001	2002	2003
1	Pertanian	1,9847	1,9685	2,0029	1,9756	2,0315
2	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,3520	1,3543	1,2840	1,2456	1,2057
3	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,0214	1,0658	1,0487	1,0259	1,0069
4	Sektor Angkutan dan Komunikasi	0,8154	0,8718	0,9105	0,8848	0,8948
5	Konstruksi	0,6820	0,7255	0,8134	0,8283	0,8621

Sumber : Lampiran 5

Hasil perhitungan *LQ* pada sektor unggulan di Kabupaten Situbondo dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian

Hasil perhitungan analisis *LQ* memperlihatkan bahwa sektor pertanian memiliki nilai *LQ* yang tetap stabil walaupun terkadang mengalami peningkatan atau penurunan, tetapi tidak terlalu besar. Nilai *LQ* sektor pertanian pada tahun 1999 sebesar 1,9847, kemudian mengalami penurunan yang sangat kecil, pada tahun 2000 yaitu sebesar 1,9685. pada tahun 2001 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,0029, tetapi pada tahun 2002 mengalami penurunan kembali menjadi 1,9756. Pada tahun 2003 nilai *LQ* sektor pertanian menjadi sebesar 2,0315. Sektor pertanian yang ada di Kabupaten Situbondo merupakan sektor ekonomi yang unggul di daerah himpunan. Ini terbukti dari hasil perhitungan di atas bahwa sektor pertanian di Kabupaten Situbondo mempunyai nilai $LQ > 1$. Apabila dilihat dari peranan terhadap sumbangan PDRB Kabupaten Situbondo, sektor pertanian menyumbang rata-rata sebesar 35 persen.

Untuk wilayah Jawa Timur sektor pertanian mampu menyumbang sekitar 17 persen, jadi sektor pertanian di Kabupaten Situbondo dapat dikatakan unggul dari daerah himpunan. Jadi sektor pertanian di Kabupaten Situbondo perlu mendapat perhatian yang lebih dalam perkembangan perekonomian di Kabupaten Situbondo.

2. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan penyumbang terbesar kedua setelah sektor pertanian terhadap kontribusi PDRB Kabupaten Situbondo. Sumbangan sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB Kabupaten Situbondo selama tahun 1999 – 2003 sekitar 28 persen, sedangkan untuk PDRB Provinsi Jawa Timur mampu menyumbang sekitar 21 persen. Apabila dilihat dari perhitungan nilai LQ di atas, pada tahun 1999 sebesar 1,3520. Untuk tahun 2000 cenderung tidak berubah yaitu sebesar 1,3543, pada tahun 2001 mengalami penurunan menjadi 1,2840, tahun 2002 turun menjadi 1,2057, begitu juga untuk tahun 2003 mengalami penurunan menjadi 1,2057.

Meskipun mengalami penurunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran mampu bersaing di daerah himpunan, terbukti dengan nilai $LQ > 1$. Untuk itu sektor perdagangan, hotel dan restoran perlu mendapat perhatian yang lebih dalam perkembangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Situbondo.

3. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Dari hasil perhitungan nilai LQ pada tahun 1999 - 2003 sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan termasuk sektor yang unggul di daerah himpunan Jawa Timur, disebabkan nilai $LQ > 1$. Pada tahun 1999 sebesar 1,0214. Pada tahun 2000 mengalami kenaikan yang sangat kecil menjadi 1,0658. Pada tahun 2001 nilai LQ sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami penurunan menjadi 1,0487, begitu juga dengan tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2002 mengalami penurunan menjadi 1,0259. Pada tahun 2003 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu menjadi 1,0069.

Apabila dilihat dari sumbangan atau kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Situbondo, sektor ini menyumbang sekitar 5 persen selama tahun observasi. Untuk PDRB Wilayah Jawa Timur mampu menyumbang sekitar 5 persen.

Meskipun kecil sumbangan yang diberikan kepada PDRB baik di Kabupaten Situbondo maupun Provinsi Jawa Timur, namun sektor ini merupakan sektor ekonomi yang unggul di daerah himpunan, dikarenakan nilai $LQ > 1$.

4. Sektor Angkutan dan Komunikasi

Peranan sektor angkutan dan komunikasi terhadap kontribusi PDRB Kabupaten Situbondo mampu menyumbang sekitar 7 persen, sedangkan untuk PDRB Provinsi Jawa Timur sebesar 8 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor angkutan dan komunikasi yang ada di kabupaten Situbondo sangat kecil sekali peranannya. Apabila dilihat dari nilai LQ selama tahun penelitian, sektor angkutan dan komunikasi yang ada di Kabupaten Situbondo kurang dari satu ($LQ < 1$). Jadi sektor angkutan dan komunikasi bukan merupakan sektor unggulan, karena kalah bersaing dengan sektor yang sama di daerah himpunan. Nilai LQ selama tahun penelitian (tahun 1999 – 2003), yaitu 0,8154, menjadi 0,8718 ditahun 2000.

Pada tahun 2001 mengalami peningkatan menjadi 0,9105. Sedangkan untuk tahun 2002 mengalami penurunan kembali menjadi 0,8848, sedangkan pada tahun 2003 sebesar 0,8948.

5. Sektor Konstruksi

Bila dilihat dari besarnya sumbangan PDRB di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur selama tahun penelitian, sektor konstruksi hanya menyumbang sekitar 3 persen dan 4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor konstruksi sangat kecil peranannya terhadap PDRB baik di Kabupaten Situbondo maupun Provinsi Jawa Timur.

Nilai LQ pada sektor konstruksi selama tahun observasi (1999 – 2003) kurang dari satu ($LQ < 1$). Pada tahun 1999 sebesar 0,6820. Pada tahun 2000 mengalami kenaikan menjadi 0,7255. Sedangkan untuk tahun 2001, 2002 dan 2003 adalah masing-masing sebesar 0,8134, 0,8283 dan 0,8621. Sektor konstruksi yang ada di Kabupaten Situbondo bukan merupakan sektor unggulan, karena kalah bersaing dengan sektor yang sama di daerah himpunan Provinsi Jawa Timur ($LQ < 1$).

b. Analisis Koefisien Pergeseran *Archelus*

Koefisien Pergeseran *Archelus* ini adalah sebuah modifikasi dari koefisien pergeseran klasik yakni koefisien yang menjelaskan seberapa besar perubahan proporsi penyerapan tenaga kerja di sektor i di daerah j antara awal sampai akhir

periode pengamatan. Analisis Koefisien Pergeseran *Archelus* digunakan untuk mencari sektor-sektor yang efek ramifikasinya mampu mendorong perkembangan perekonomian daerah. Efek ramifikasi tersebut dapat diketahui dengan melihat perkembangan sektor di tingkat nasional maupun regional yang akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan sektor di daerah. Selain itu, juga menjelaskan Koefisien Komponen Laju Pertumbuhan, Koefisien Bauran Industri dan Koefisien Kedudukan Kompetitif.

Hasil perhitungan Koefisien Pergeseran *Archelus* dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 19 Nilai Koefisien Pergeser *Archelus*

No	Sektor Perekonomian	N_{ij}	M_{ij}	C_{ij}	L_{ij}
1	Pertanian	0,06178	-0,02702	-0,05655	-0,02179
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00008	0,00008	0,00230	0,00238
3	Industri Pengolahan	0,00947	-0,01214	0,00646	0,00380
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,00028	0,00014	-0,00012	0,00040
5	Konstruksi	0,00164	-0,00517	0,02006	0,01653
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,01850	-0,02649	0,02048	0,01249
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0,00502	-0,00022	-0,00190	-0,00160
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,00052	0,00055	0,00423	0,00530
9	Jasa-jasa	0,01359	-0,03631	0,00090	-0,02165

Sumber: lampiran 12

Pada tabel di atas kolom 3 diperlihatkan bahwa Koefisien Laju Pertumbuhan seluruhnya di Kabupaten Situbondo bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa seluruh sektor di Kabupaten Situbondo menarik minat dunia usaha dan sektor-sektor tersebut telah menyediakan faktor-faktor dan sumberdaya ekonomi yang dibutuhkan sebagai syarat penting untuk memulai usaha sebagai alat untuk mempertahankan eksistensi pasar. Pertanian menduduki peringkat pertama dalam Koefisien Komponen Laju Pertumbuhan, hal ini menunjukkan bahwa pertanian dengan Koefisien Komponen Laju Pertumbuhan sebesar 0,06178 akan mempengaruhi perkembangan proporsi penyerapan tenaga kerja di seluruh sektor perekonomian di daerah acuan (Provinsi Jawa Timur) dan memperkuat proporsi penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian di daerah j (Kabupaten Situbondo). Sektor pertanian mempunyai faktor-faktor dan sumberdaya-

sumberdaya yang tersedia di Kabupaten Situbondo sehingga sektor pertanian ini mempunyai efek ramifikasi terhadap laju pertumbuhan sektor-sektor lain untuk mendorong perekonomian daerah. Sektor-sektor lain yang mempunyai potensi dalam dunia usaha dan tersedianya sumberdaya di Kabupaten Situbondo berdasarkan Koefisien Komponen Laju Pertumbuhan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati peringkat ke-2 yaitu sebesar 0,01850, sektor jasa menempati posisi ke-3 yaitu sebesar 0,01359. Sektor industri pengolahan menempati peringkat ke-4 yaitu sebesar 0,00947, sektor angkutan komunikasi sebesar 0,00502 adalah peringkat ke-5, peringkat ke-6 ditempati oleh sektor konstruksi yaitu sebesar 0,00164, peringkat ke-7 ditempati oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yaitu sebesar 0,00052, sedangkan peringkat ke-8 adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,00038 dan untuk peringkat ke-9 adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,00008.

Pada kolom ke-4 perhitungan Koefisien Bauran Industri terdapat 3 sektor ekonomi yang bernilai positif dan terdapat 6 sektor ekonomi di Kabupaten Situbondo yang bernilai negatif. Sektor-sektor ekonomi yang bernilai positif terhadap perhitungan Koefisien Bauran Industri adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,00055, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,00014, selanjutnya sektor pertambangan sebesar 0,00008. Sektor-sektor ekonomi di atas akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi di Kabupaten Situbondo seperti yang disinggung pada bab teori karena adanya proses aglomerasi industri akan memperkuat proporsi penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi tersebut di Kabupaten Situbondo.

Dari 6 sektor ekonomi yang memiliki nilai negatif adalah sektor angkutan dan komunikasi sebesar -0,00022, sektor konstruksi sebesar -0,00562 sektor industri pengolahan sebesar -0,01214, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar -0,02649, sektor pertanian sebesar -0,02702, dan selanjutnya adalah sektor jasa sebesar -0,03631. Sektor-sektor ekonomi yang bernilai negatif ini di wilayah Provinsi Jawa Timur mengakibatkan penurunan atau kemunduran perkembangan sektor-sektor ekonomi tersebut di Kabupaten Situbondo.

Pada kolom 5 terlihat bahwa sebagian besar sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Situbondo pada Koefisien Kedudukan Kompetitif bernilai positif yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,02048, sektor konstruksi sebesar 0,02006, sektor industri pengolahan sebesar 0,00646, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,00423 sektor pertambangan sebesar 0,00230, sektor jasa sebesar 0,0009. Sektor-sektor ini akan semakin menguat atau perubahan proporsi penyerapan tenaga kerja sebagai akibat kemampuan Kabupaten Situbondo untuk menggeserkan kedudukan kompetitif sektor-sektor perekonomian yang bernilai positif tersebut pada perekonomian wilayah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sektor-sektor yang mempunyai nilai negatif pada Koefisien Kedudukan Kompetitif adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar -0,00011, sektor angkutan dan komunikasi sebesar -0,00190, dan sektor pertanian sebesar -0,05655. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ini melemah dalam struktur perekonomian di wilayah Provinsi Jawa Timur.

4.3 Pembahasan

Kabupaten Situbondo, dari sisi ekonomi memiliki sifat kota dengan karakteristik yang didominasi oleh sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, tidak jauh berbeda dengan karakteristik daerah kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur, dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian. Menurut Perroux, daerah-daerah yang terletak dalam suatu wilayah yang luas tidaklah berkembang dalam keadaan dan kecepatan yang sama, dalam arti lain terdapat daerah yang berkembang dengan cepat dan akan menjadi daerah pusat pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya ada daerah yang berkembang dengan lambat dan akan menjadi daerah *hinterland* di wilayah Provinsi Jawa Timur. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo sebesar 2 persen, lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 1,8 persen.

Keunggulan Kabupaten Situbondo dibandingkan dengan daerah himpunan Provinsi Jawa Timur, dapat diketahui dari hasil analisis *LQ* melalui kontribusi PDRB sektoral. Dilihat dari nilai *LQ* pada tahun 1999 – 2003, terdapat tiga sektor ekonomi di Kabupaten Situbondo yang unggul di daerah himpunan yaitu sektor

pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Enam sektor lainnya tidak dapat diunggulkan untuk memenangkan persaingan di wilayah Jawa Timur adalah sektor angkutan dan komunikasi, sektor konstruksi, sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan, sektor listrik gas, dan air bersih, sektor pertambangan dan penggalian.

Sektor industri yang ada di Kabupaten Situbondo yang diharapkan sebagai sektor yang unggul di wilayah Jawa Timur ternyata kalah dalam persaingan. Hal ini disebabkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Situbondo kalah bersaing dengan kontribusi sektor industri di wilayah Jawa Timur. Apabila dilihat dari peranan terhadap kontribusi PDRB di Kabupaten Situbondo, sektor industri menempati urutan ketiga yaitu dengan rata-rata 10,06 persen selama tahun penelitian (1999 – 2003). Meskipun sektor industri yang ada di Kabupaten Situbondo tidak termasuk sektor yang unggul di Provinsi Jawa Timur, tetapi apabila dilihat dari peranannya terhadap perekonomian di Kabupaten Situbondo, hendaknya sektor ini dijadikan salah satu sektor ekonomi yang diprioritaskan untuk mendampingi sektor basis (sektor pertanian) dalam perkembangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan hasil analisis Koefisien Pergesaran *Archelus* dengan menggunakan pendekatan analisis Koefisien Laju Pertumbuhan, Koefisien Bauran Industri, dan Koefisien Kedudukan Kompetitif, dapat diketahui mengenai ketenagakerjaan di tiap-tiap sektor yang ada di Kabupaten Situbondo yang unggul di daerah himpunan. Untuk Koefisien Laju Pertumbuhan sesuai dengan hasil perhitungan, bahwa sektor pertanian menduduki peringkat pertama yaitu sebesar 0,06178, untuk peringkat kedua ditempati sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 0,01850, sedangkan untuk peringkat ketiga ditempati oleh sektor jasa-jasa yaitu sebesar 0,01359, dan untuk posisi keempat ditempati oleh sektor industri pengolahan yaitu sebesar 0,00947. Hal ini berarti keempat sektor tersebut di tingkat Provinsi Jawa Timur atau di daerah himpunan memiliki pengaruh yang kuat yang menyebabkan keempat sektor tersebut terutama sektor pertanian yang menempati urutan pertama di Kabupaten Situbondo semakin menguat.

Untuk Koefisien Bauran Industri, dari hasil perhitungan koefisien ini hanya terdapat tiga sektor ekonomi di Kabupaten Situbondo yang bernilai positif yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,00055 untuk urutan kedua adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,00014, sedangkan untuk sektor pertambangan dan penggalian menempati urutan ketiga yaitu sebesar 0,00008. Sedangkan enam sektor ekonomi yang lainnya yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa bernilai negatif, ini berarti sektor-sektor tersebut dengan proporsi tenaga kerjanya tidak mampu memberikan efek aglomerasi yang kuat, dengan ditandainya bahwa proporsi tenaga kerja di Kabupaten Situbondo tidak menimbulkan industri baru.

Koefisien Kedudukan Kompetitif, bahwa ada enam sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Situbondo yang bernilai positif. Hal ini berarti enam sektor ekonomi tersebut dapat atau mampu menggeser kedudukan kompetitif yang ada di Provinsi Jawa Timur, sektor-sektor ekonomi tersebut antara lain: sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,02048, sektor konstruksi sebesar 0,02006, sektor industri pengolahan sebesar 0,00646, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,00423, sektor pertambangan sebesar 0,00223, sektor jasa-jasa sebesar 0,00089, sedangkan sektor-sektor yang bernilai negatif adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar -0,00012, sektor angkutan dan komunikasi sebesar -0,00190, dan sektor pertanian sebesar -0,05655.

5. KESIMPULAN DAN SARAN



5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan, dan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil analisis LQ yang mengukur suatu peranan sektor ekonomi di Kabupaten Situbondo melalui sumbangan PDRB menunjukkan bahwa ada tiga sektor ekonomi di Kabupaten Situbondo yang mempunyai nilai $LQ > 1$, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Ketiga sektor ekonomi ini merupakan sektor prioritas di Kabupaten Situbondo, karena unggul dalam persaingan dari sektor yang sama di daerah himpunan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan enam dari sembilan sektor ekonomi yang bukan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Situbondo adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik gas, dan air bersih, sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa, karena sektor-sektor ekonomi tersebut nilai $LQ < 1$.

Hasil analisis Koefisien Pergeseran *Archelus* yang mengukur peranan sektor-sektor ekonomi untuk mendampingi sektor basis dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Situbondo yang menggunakan pendekatan berdasarkan ketersediaan faktor tenaga kerja terdiri dari tiga alat analisis yaitu Koefisien Komponen Laju Petumbuhan, Koefisien Komponen Bauran Industri, dan Koefisien Komponen Kedudukan Kompetitif. Menunjukkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai positif (> 0) pada alat analisis **Koefisien Komponen Laju Pertumbuhan** adalah seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Situbondo. Hal ini berarti perkembangan proporsi penyerapan tenaga kerja di seluruh sektor perekonomian di daerah acuan (Provinsi Jawa Timur) akan memperkuat proporsi penyerapan tenaga kerja di sektor i di daerah j (Kabupaten Situbondo). Hasil analisis tersebut sektor pertanian yang paling unggul dan mendapat prioritas utama. Pada alat analisis **Koefisien Komponen Bauran Industri** terdapat tiga sektor ekonomi

di Kabupaten Situbondo yang mempunyai nilai positif (> 0) terbesar yaitu sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini menunjukkan ketiga sektor ekonomi yang bernilai positif tersebut akan memperkuat proporsi penyerapan tenaga kerja di sektor I daerah j karena adanya proses aglomerasi industri. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang paling unggul dan patut diprioritaskan. Sedangkan enam sektor ekonomi yang lain memiliki nilai negatif (< 0). Alat analisis **Koefisien Komponen Kedudukan Kompetitif** menunjukkan hasil bahwa terdapat enam sektor ekonomi di Kabupaten Situbondo yang bernilai positif (> 0), yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor konstruksi, sektor industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor pertambangan, dan sektor jasa-jasa. Keenam sektor ekonomi ini semakin menguat semakin menguat di Kabupaten Situbondo dan mampu menggeser kedudukan kompetitif sektor perekonomian yang ada di daerah acuan Provinsi Jawa Timur. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang paling unggul dan menjadi sektor yang diprioritaskan. Sedangkan tiga sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Situbondo bernilai negatif (< 0) yaitu sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor angkutan dan komunikasi. Berarti ketiga sektor ekonomi ini semakin melemah dalam proporsi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Situbondo.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka ada beberapa saran:

1. Sektor-sektor ekonomi yang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Situbondo, khususnya sektor terpilih yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan perlu mendapat pengkajian lebih dan bahkan perlu diadakan usaha untuk menjadi motor penggerak bagi peningkatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Situbondo melalui efek ramifikasinya terhadap sektor-sektor ekonomi yang lain.

2. Ketersediaan Sumber Daya Alam yang sangat melimpah hendaknya lebih dioptimalkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Subsektor perikanan utamanya laut sangatlah potensial untuk lebih diutamakan. Hampir di Kabupaten Situbondo terdapat laut atau pantai di setiap kecamatannya, kecuali Kecamatan Sumbermalang, Jatibanteng dan Kecamatan Panji. Terdapat tujuh buah TPI. Selain besarnya sumbangan terhadap PDRB Kabupaten Situbondo, peranannya pada penyerapan tenaga kerja juga sangatlah besar. Untuk itu disarankan kepada pihak perencana Kabupaten Situbondo lebih memanfaatkan potensi laut yang ada di Kabupaten Situbondo.
3. Diperlukan adanya investasi berskala besar di Kabupaten Situbondo untuk menuju pembangunan yang lebih maju yang mengarah pada pergeseran ekonomi dari ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian menuju ekonomi industri melalui kegiatan ekonomi agro industri, sehingga dalam jangka panjang Kabupaten Situbondo menjadi daerah pusat pertumbuhan dan bukan sebagai daerah *hinterland*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE- YKPN.
- 1999. *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Aziz, I.J. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan beberapa aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: LPFE-UI.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo dan BAPPEKAB Situbondo. 2003. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Situbondo 1999 – 2003*. Situbondo.
-2003. *Kabupaten Situbondo Dalam Angka Tahun 1999 - 2003*. Situbondo.
- Biro Pusat Statistik Jawa Timur. 2003. *Jawa Timur Dalam Angka*. Surabaya.
- Budiharsono, S. 1991. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: FE-UI.
- Dajan, A. 1986. *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta: LP3ES.
- Djojohadikusumo, S. 1994. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.
- Fibryani, I. 2005. *Pengembangan Sektor-sektor Perekonomian Kabupaten Probolinggo Menuju Perekonomian Yang Berkembang Secara Berkelanjutan*. Skripsi tak dipublikasikan. Jember: FEUJ.
- Glasson, J. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*. Jakarta: LPFE-UI.
- Irawan dan Suparmoko. 1992. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Jhinghan. M.L., 1994. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Terjemah-an. P.T. Raja Grafindo Persada (d/h Rajawali Pers), Jakarta.
- Kadariah. 1985. *Ilmu Ekonomi Perencanaan*. Jakarta : LPFE-UI.

- Leifer, P. 1993. *Marketing Places The Free Press*. A Divisior of Macmillan. Inc. New York.
- Kuncoro, Mudarajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masaian, dan Kebijakan, Akademi Manajemen Perusahaan*. Yogyakarta: YKPN.
- Muharso, U. 2004. *Penentuan Sektor Perekonomian Yang Dikembangkan Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian Di Kabupaten Bondowoso*. tesis tak dipublikasikan. Jember: FEUJ.
- Nuryasman. 1996. *Pembangunan Konsep Pusat Pertumbuhan Terhadap Kepulauan Indonesia*. Jakarta : Media Ekonomi Tri Sakti.
- Salvatore, D. 1997. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Sukirno, S. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPFE-UI.
- Tambunan T.H. Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia : " Teori dan temuan Empiris "*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tarigan, R. 2004. *Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M. P. 2000. *Ekonomi Untuk Negara Berkembang*. Edisi ketiga. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahyu, R. 2000. *Identifikasi Sektor Potensial Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Mojokerto*. Skripsi tak dipublikasikan. Jember : FEUJ.
- Warpani, S. 1984. *Analisis Kota dan Daerah* . Bandung: ITB.
- Winardi. 1983. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Tarsito.

Lampiran 1 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Timur Tahun 1999-2003 (juta rupiah)

No	Sektor	1999	2000	2001	2002	2003
01	Pertanian	10.056.430,48	10.126.247,34	10.246.976,92	10.461.874,85	10.649.954,58
02	Pertambangan	820.481,97	1.138.197,73	1.136.381,98	1.176.352,64	1.202.792,84
03	Industri Pengolahan	15.096.119,16	15.357.553,01	15.597.265,77	15.335.942,61	15.767.591,92
04	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.332.448,19	1.483.158,36	1.594.202,10	1.710.559,78	1.863.983,76
05	Konstruksi	2.629.204,56	2.607.913,29	2.361.188,42	2.657.360,80	2.707.175,06
06	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11.403.499,39	11.908.392,17	12.871.766,90	13.805.154,89	14.883.857,75
07	Angkutan dan Komunikasi	4.441.895,08	4.745.526,75	4.792.517,95	5.327.307,91	5.531.794,96
08	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.087.742,86	3.193.520,82	3.378.586,36	3.522.598,67	3.657.757,65
09	Jasa-jasa	6.191.148,76	6.296.011,25	6.501.293,83	6.756.904,05	6.987.257,93
	PDRB	55.058.970,46	56.856.520,71	58.750.180,22	60.754.056,19	63.252.166,46

Sumber : BPS Jawa Timur, Desember 2003

Lampiran 2 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Situbondo Tahun 1999-2003 (juta rupiah)

No	Sektor	1999	2000	2001	2002	2003
01	Pertanian	306.314,88	303.666,08	310.674,62	311.614,96	325.364,07
02	Pertambangan	5.101,44	4.954,35	5.138,88	6.018,28	6.815,88
03	Industri Pengolahan	93.341,78	86.010,11	87.848,94	86.932,53	88.438,53
04	Listrik, Gas dan Air Bersih	7.996,85	8.090,41	8.861,68	9.377,91	10.032,79
05	Konstruksi	27.541,49	28.866,45	29.093,92	33.145,24	35.089,15
06	Perdagangan, Hotel dan Restoran	236.606,18	243.986,88	250.072,51	259.156,94	269.825,10
07	Angkutan dan Komunikasi	55.652,38	63.049,86	66.100,49	71.056,55	74.502,50
08	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	48.440,02	51.920,67	53.644,45	54.430,14	55.346,28
09	Jasa-jasa	64.250,08	75.553,11	77.966,27	84.159,83	85.770,23
	PDRB	845.245,10	866.097,92	889.401,76	915.892,38	951.184,54

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo, Desember 2003

Lampiran 3 : Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Timur Tahun 1999-2003 (persen)

No	Sektor	1999	2000	2001	2002	2003
01	Pertanian	18,26	17,81	17,44	17,22	16,84
02	Pertambangan	1,49	2,23	1,93	1,94	1,90
03	Industri Pengolahan	27,42	27,14	26,55	25,24	24,93
04	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,42	2,63	2,71	2,82	2,95
05	Konstruksi	4,78	4,61	4,48	4,37	4,28
06	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,71	20,75	21,91	22,72	23,53
07	Angkutan dan Komunikasi	8,07	8,23	8,16	8,77	8,75
08	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,61	5,48	5,75	5,80	5,78
09	Jasa-jasa	11,24	11,11	11,07	11,12	11,05
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Jawa Timur, Desember 2003

Lampiran 4 : Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Situbondo Tahun 1999-2003 (persen)

No	Sektor	1999	2000	2001	2002	2003
01	Pertanian	36,24	35,06	34,93	34,02	36,58
02	Pertambangan	0,60	0,57	0,58	0,66	0,77
03	Industri Pengolahan	11,04	9,93	9,88	9,49	9,94
04	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,95	0,93	1,00	1,02	1,13
05	Konstruksi	3,26	3,33	3,27	3,62	3,95
06	Perdagangan, Hotel dan Restoran	27,99	28,17	28,12	28,30	30,34
07	Angkutan dan Komunikasi	6,58	7,28	7,43	7,76	8,38
08	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,73	5,99	6,03	5,94	6,22
09	Jasa-jasa	7,60	8,72	8,77	9,19	9,64
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo, Desember 2003

**Lampiran 5 : Perhitungan *Location Quotion* Sektor Ekonomi di Kabupaten
Situbondo Tahun 1999-2003**

$$LQ = \frac{X_{in}/Y_n}{X_i/Y}$$

1. Sektor Pertanian

$$\begin{aligned} LQ \text{ Tahun 1999} &= \frac{306.314,88/845.245,10}{10.056.430,48/55.058.970,46} \\ &= 1,9847 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LQ \text{ Tahun 2000} &= \frac{303.666,08/866.097,92}{10.126.247,34/56.856.520,71} \\ &= 1,9685 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LQ \text{ Tahun 2001} &= \frac{310.674,62/889.401,76}{10.246.976,92/58.750.180,22} \\ &= 2,0029 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LQ \text{ Tahun 2002} &= \frac{311.614,96/915.892,38}{10.461.874,85,85/60.754.056,19} \\ &= 1,9756 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LQ \text{ Tahun 2003} &= \frac{325.364,07/951.184,54}{10.649.954,58/63.252.166,46} \\ &= 2,0315 \end{aligned}$$

2. Sektor Pertambangan

$$\begin{aligned} LQ \text{ Tahun 1999} &= \frac{5.101,44/845.245,10}{820.481.97/55.058.970,46} \\ &= 0,4027 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LQ \text{ Tahun 2000} &= \frac{4.954,35/866.097,92}{1.138.197,73/56.856.520,71} \\ &= 0,2850 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LQ \text{ Tahun 2001} &= \frac{5.138,88/889.401,76}{1.136.381,98/58.750.180,22} \\ &= 0,3005 \end{aligned}$$

$$LQ \text{ Tahun } 2002 = \frac{6.018,28/915.892,38}{1.176.352,64/60.754.056,19}$$

$$= 0,3402$$

$$LQ \text{ Tahun } 2003 = \frac{6.815,88/951.184,54}{1.202.792,84/63.252.166,46}$$

$$= 0,3789$$

3. Sektor Industri Pengolahan

$$LQ \text{ Tahun } 1999 = \frac{93.241,78/845.245,10}{15.096.119,16/55.058.970,46}$$

$$= 0.4026$$

$$LQ \text{ Tahun } 2000 = \frac{86.010,11/866.097,92}{15.357.553,01/56.856.520,71}$$

$$= 0,3676$$

$$LQ \text{ Tahun } 2001 = \frac{87.848,94/889.401,76}{15.597.265,77/58.750.180,22}$$

$$= 0,3721$$

$$LQ \text{ Tahun } 2002 = \frac{86.932,53/915.892,38}{15.335.942,61/60.754.056,19}$$

$$= 0,3759$$

$$LQ \text{ Tahun } 2003 = \frac{88.438,53/951.184,54}{15.767.591,92/63.252.166,46}$$

$$= 0,3726$$

4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

$$LQ \text{ Tahun } 1999 = \frac{7.996,85/845.245,10}{1.332.448,19/55.058.970,46}$$

$$= 0,3926$$

$$LQ \text{ Tahun } 2000 = \frac{8.090,41/866.097,92}{1.483.158,36/56.856.520,71}$$

$$= 0,3563$$

$$LQ \text{ Tahun } 2001 = \frac{8.861,68/889.401,76}{1.594.202,10/58.750.180,22}$$

$$= 0,3653$$

$$LQ \text{ Tahun 2002} = \frac{9.377,91/915.892,38}{1.710.559,78/60.754.056,19}$$

$$= 0,3617$$

$$LQ \text{ Tahun 2003} = \frac{10.032,79/951.184,54}{1.863.983,76/63.252.166,46}$$

$$= 0,3559$$

5. Sektor Konstruksi

$$LQ \text{ Tahun 1999} = \frac{27.541,49/845.245,10}{2.269.240,56/55.058.970,46}$$

$$= 0,6820$$

$$LQ \text{ Tahun 2000} = \frac{28.866,45/866.097,92}{2.607.913,29/56.856.520,71}$$

$$= 0,7255$$

$$LQ \text{ Tahun 2001} = \frac{29.093,92/889.401,76}{2.361.188,42/58.750.180,22}$$

$$= 0,8134$$

$$LQ \text{ Tahun 2002} = \frac{33.145,24/915.892,38}{2.657.360,80/60.754.056,19}$$

$$= 0,8283$$

$$LQ \text{ Tahun 2003} = \frac{35.089,15/951.184,54}{2.707.175,06/63.252.166,46}$$

$$= 0,8621$$

6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

$$LQ \text{ Tahun 1999} = \frac{236.606,18/845.245,10}{11.403.499,39/55.058.970,46}$$

$$= 1,3520$$

$$LQ \text{ Tahun 2000} = \frac{243.986,88/866.097,92}{11.908.392,17/56.856.520,71}$$

$$= 1,3543$$

$$LQ \text{ Tahun } 2001 = \frac{250.072,51/889.401,76}{12.871766,90/58.750.180,22}$$

$$= 1,2840$$

$$LQ \text{ Tahun } 2002 = \frac{259.156,94/915.892,38}{13.805.154,89/60.754.056,19}$$

$$= 1,2456$$

$$LQ \text{ Tahun } 2003 = \frac{269.825,10/951.184,54}{14.883.857,75/63.252.166,46}$$

$$= 1,2057$$

7. Sektor Angkutan dan Komunikasi

$$LQ \text{ Tahun } 1999 = \frac{55.652,38/845.245,10}{4.441.895,08/55.058.970,46}$$

$$= 0,8154$$

$$LQ \text{ Tahun } 2000 = \frac{63.049,86/866.097,92}{4.745.526,75/56.856.520,71}$$

$$= 0,8718$$

$$LQ \text{ Tahun } 2001 = \frac{66.100,49/889.401,76}{5.327.307,91/58.750.180,22}$$

$$= 0,9105$$

$$LQ \text{ Tahun } 2002 = \frac{71.056,55/915.892,38}{5.327.307,92/60.754.056,19}$$

$$= 0,8848$$

$$LQ \text{ Tahun } 2003 = \frac{74.502,50/951.184,54}{5.531.794,96/63.252.166,46}$$

$$= 0,8948$$

8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

$$LQ \text{ Tahun } 1999 = \frac{48.440,02/845.245,10}{3.087.742,86/55.058.970,46}$$

$$= 1,0214$$

$$LQ \text{ Tahun } 2000 = \frac{51.920,67/866.097,92}{3.193.520,82/56.856.520,71}$$

$$\begin{aligned}
 &= 1,0658 \\
 LQ \text{ Tahun 2001} &= \frac{53.644,45/889.401,76}{3.378.586,36/58.750.180,22} \\
 &= 1,0487 \\
 LQ \text{ Tahun 2002} &= \frac{54.430,14/915.892,38}{3.522.598,67/60.754.056,19} \\
 &= 1,0259 \\
 LQ \text{ Tahun 2003} &= \frac{55.346,28/951.184,54}{3.657.757,65/63.252.166,46} \\
 &= 1,0069
 \end{aligned}$$

9. Sektor Jasa-jasa

$$\begin{aligned}
 LQ \text{ Tahun 1999} &= \frac{64.250,08/845.245,10}{6.191.148,76/55.058.970,46} \\
 &= 0,6761 \\
 LQ \text{ Tahun 2000} &= \frac{75.553,11/866.097,92}{6.296.011,25/56.856.520,71} \\
 &= 0,7877 \\
 LQ \text{ Tahun 2001} &= \frac{77.966,27/889.401,76}{6.501.293,83/58.750.180,22} \\
 &= 0,7929 \\
 LQ \text{ Tahun 2002} &= \frac{84.159,83/915.892,38}{6.756.904,05/60.754.056,19} \\
 &= 0,8264 \\
 LQ \text{ Tahun 2003} &= \frac{85.770,23/951.184,54}{6.987.257,93/63.252.166,46} \\
 &= 0,8163
 \end{aligned}$$

Lampiran 6

Tabel Proporsi Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Berdasarkan Sektor Perekonomian Tahun 1999-2003

No	Sektor	1999	2000	2001	2002	2003
1	Pertanian	172.166	181.517	184.155	196.361	154.821
2	Pertambangan	224	-	301	853	858
3	Industri Pengolahan	26.388	17629	23.306	18.837	25.806
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	783	178	454	518	806
5	Konstruksi	4.587	10.305	11.483	9.601	9.048
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	51.541	47.934	52.218	46.026	51.853
7	Angkutan dan Komunikasi	14.006	17.416	15.554	13.564	13.952
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1453	1353	2.112	1.341	2.888
9	Jasa-jasa	37885	25692	29.001	17.709	29.214
	Jumlah	309033	302.024	318.584	304.810	289246

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo Tahun 2003

Lampiran 8

Tabel Proporsi Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Berdasarkan Sektor Perekonomian Tahun 1999-2003 (persen)

No	Sektor	1999	2000	2001	2002	2003	(E*i-Ei)/Ei
1	Pertanian	55,71	60,10	57,80	64,42	53,53	-0,0391
2	Pertambangan	0,07	-	0,09	0,28	0,30	3,2857
3	Industri Pengolahan	8,54	5,84	7,32	6,18	8,92	0,0445
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,25	0,06	0,14	0,17	0,28	0,1200
5	Konstruksi	1,48	3,41	3,60	3,15	3,13	1,1149
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,68	15,87	16,39	15,10	17,93	0,0749
7	Angkutan dan Komunikasi	4,53	5,77	4,88	4,45	4,82	0,0640
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,47	0,45	0,66	0,44	1,00	1,1277
9	Jasa-jasa	12,26	8,51	9,10	5,81	10,10	-0,1762
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo: data diolah

Lampiran 9

Perhitungan Besarnya Nilai M (Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Seluruh Sektor Perekonomian Provinsi Jawa Timur)

Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 1999 = 16.652.784 jiwa

Jumlah penduduk yang bekerja usia 10 tahun ke atas roporasi pada tahun 2003 = 18.499.419 jiwa

Selisih jumlah penduduk usia 10 tahu ke atas tahun 2003 ($E*ij$) dengan tahun 1999 (Eij) = 1.846635 jiwa

$$m = (E*ij - Eij)/Eij = 1.846635/16.652.784 = 0,11089045$$

Tabel Perhitungan Besarnya Nilai Koefisien Komponen Laju Pertumbuhan ($Eij.m$) Kabupaten Situbondo

No	Sektor	Eij	m	Eij.m
1	Pertanian	0,5571	0,11089045	0,061777069
2	Pertambangan	0,0007	0,11089045	0,000077623
3	Industri Pengolahan	0,0854	0,11089045	0,009470044
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,0025	0,11089045	0,000277226
5	Konstruksi	0,0148	0,11089045	0,001641178
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,1668	0,11089045	0,018496527
7	Angkutan dan Komunikasi	0,0453	0,11089045	0,005023337
8	Keuangan, Persewaan, dan jasa Perusahaan	0,0047	0,11089045	0,000521185
9	Jasa-jasa	0,1226	0,11089045	0,013595169

Sumber : Lampiran 7, data diolah

Lampiran 10

Tabel Perhitungan Besarnya Nilai Koefisien Komponen Bauran Industri

No	Sektor	Eij	$(E^*_{in} - E_{in})/E_{in}$	m	$[(E^*_{in} - E_{in})/E_{in}] - m$	$E_{ij}[(E^*_{in} - E_{in})/E_{in}] - m]$
1	Pertanian	0,5571	0,0624	0,11089045	-0,0485	-0,02701935
2	Pertambangan	0,0007	0,0000	0,11089045	0,1109	0,00007763
3	Industri Pengolahan	0,0854	-0,0312	0,11089045	-0,1421	-0,01213534
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,0025	0,1667	0,11089045	0,0558	0,00013950
5	Konstruksi	0,0148	-0,2403	0,11089045	-0,3492	-0,00516816
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,1668	-0,0479	0,11089045	-0,1588	-0,02648784
7	Angkutan dan Komunikasi	0,0453	0,1060	0,11089045	-0,0049	-0,00022197
8	Keuangan, Persewaan, dan jasa Perusahaan	0,0047	0,2273	0,11089045	0,1164	0,00054708
9	Jasa-jasa	0,1226	-0,1835	0,11089045	-0,2962	-0,03631412

Sumber : Lampiran 9, data diolah

Lampiran 11

Tabel Perhitungan Besarnya Nilai Koefisien Komponen Kedudukan Kompetitif

No	Sektor	E_{ij}	$(E_i - E_j) / E_i(R_{ij})$	$(E_i - R_{in}) / E_{in}(R_{in})$	$R_{ij} - R_{in}$	$E_{ij}(R_{ij} - R_{in})$
1	Pertanian	0,5571	-0,0391	0,0624	-0,1015	-0,05654565
2	Pertambangan	0,0007	3,2857	0,0000	3,2857	0,00229999
3	Industri Pengolahan	0,0854	0,0445	-0,0312	0,0757	0,00646478
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,0025	0,1200	0,1667	-0,0467	-0,00011675
5	Konstruksi	0,0148	1,1149	-0,2403	1,3552	0,02005696
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,1668	0,0749	-0,0479	0,1228	0,02048304
7	Angkutan dan Komunikasi	0,0453	0,0640	0,1060	-0,0420	-0,00190260
8	Keuangan, Persewaan, dan jasa Perusahaan	0,0047	1,1277	0,2273	0,9004	0,00423188
9	Jasa-jasa	0,1226	-0,1762	-0,1835	0,0073	0,00089498

Sumber : Lampiran 10, data diolah

Lampiran 12

Tabel Perhitungan Koefisien Pergeseran Archelus

No	Sektor Perekonomian	Nij	Mij	Cij	Dij
1	Pertanian	0,061777069	-0,02701935	-0,05654565	-0,021787931
2	Pertambangan	0,000077623	0,00007763	0,002299999	0,002377613
3	Industri pengolahan	0,009470044	-0,01213534	0,00646478	0,003799484
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,000277226	0,00013950	-0,00011675	0,000299976
5	Konstruksi	0,001641178	-0,00516816	0,02005696	0,016529978
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,018496527	-0,02648784	0,02048304	0,012491727
7	Angkutan dan Komunikasi	0,005023337	-0,00022197	-0,00190260	-0,001603385
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,000521185	0,00054708	0,00423188	0,005300145
9	Jasa-jasa	0,013595169	-0,03631412	0,00089498	-0,02165453

Sumber : Lampiran 11, data diolah

Lampiran 13

Tabel Cek Ulang Kebenaran Perhitungan

No	Sektor Perekonomian	Dij	E*ij	Eij	E*ij - Eij	Keterangan
1	Pertanian	-0,021787931	0,5353	0,5571	-0,0218	Sama
2	Pertambangan	0,002377613	0,0031	0,0007	0,0024	Sama
3	Industri pengolahan	0,003799484	0,0892	0,0854	0,0038	Sama
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,000299976	0,0028	0,0025	0,0003	Sama
5	Konstruksi	0,016529978	0,0313	0,0148	0,0165	Sama
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,012491727	0,1793	0,1668	0,0125	Sama
7	Angkutan dan Komunikasi	-0,001603385	0,0437	0,0453	-0,0016	Sama
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,005300145	0,0100	0,0047	0,0053	Sama
9	Jasa-jasa	-0,02165453	0,1009	0,1226	-0,0217	Sama

Sumber : Lampiran 12, data diolah